

ANALISIS PROFESI PENGHULU ATAS PENCATATAN PERKAWINAN ANAK

ANGKAT YANG DINASABKAN PADA AYAH ANGKAT

(Studi di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

SKRIPSI



Oleh:

NUR IHSAN KHOIRUDIN

101200088

Pembimbing

KHAIDARULLOH, M.H.I

NIP. 198612082020121005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

KHOIRUDIN, NUR IHSAN, 2024, Analisis Profesi Penghulu atas Pencatatan Perkawinan Anak Angkat yang Dinasabkan pada Ayah Angkat (Studi Di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khaidarulloh, M.H.I.

Kata Kunci: Profesi Penghulu, Pencatatan Nikah, anak angkat

Dalam literatur yuridis maupun fiqih disebutkan bahwa nasab anak angkat tidak terputus dengan orang tua kandungnya. Sehingga ketika anak tersebut menikah maka baik nasab maupun wali yang tertulis maupun terjadi tetap pada ayah kandung. Namun pada praktiknya ada beberapa kasus di Indonesia yang menjadikan ayah angkat sebagai nasab aslinya bahkan sebagai wali nikah. Di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, semenjak tahun 2022 hingga 2023 ditemukan dua kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan tinjauan yuridis normatif alasan pihak KUA tetap menikahkan anak adopsi tanpa mengubah nasab yang ada terhadap menjalankan profesinya, serta kesesuaian hukumnya pada praktik wali nikah pada kasus tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan yuridis dan normatif profesi penghulu terhadap alasan pencatatan pernikahan anak angkat yang dinasabkan pada Ayah Angkat oleh KUA Kecamatan Manguharjo? 2. Bagaimana tinjauan hukum yuridis dan normatif terhadap praktik wali nikah pada pencatatan perkawinan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkat di KUA Manguharjo Kota Madiun? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara Yuridis alasan tetap dilaksanakan pencatatan pernikahan anak angkat yang Dinasabkan pada Ayah Angkat tanpa mengubah kepada nasab yang sesungguhnya tidak melanggar tugas profesi penghulu. Karena penghulu melihat kesesuaian antara berkas yang ada dan untuk tidak memberatkan para pihak yang akan menikah. Namun secara hukum Islam, Alasan KUA tetap menikahkan di kedua kasus yang ada bertentangan, yang mana penghulu juga ikut memutuskan nasab yang asli dari kedua mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan penghulu ikut melegalkan pemutusan nasab yang padahal nasab tidak dapat diputus. (2) Praktik wali nikah pada kasus pertama sudah sesuai dengan hukum yuridis dan fikih. Karena penghulu menggunakan wali hakim sebagai wali pada pernikahan anak angkat yang Dinasabkan pada Ayah Angkat karena ayah kandung asli tidak mungkin ditemukan. Praktik wali nikah pada kasus kedua tidak sesuai dengan hukum normatif terkait wali, karena penghulu tidak berusaha menanyai keberadaan orangtua asli dan juga menjadikan ayah angkat sebagai wali nikah. Namun sudah sesuai dengan hukum

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Ihsan Khoirudin

NIM : 101200088

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PROFESI PENGHULU ATAS
PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT
YANG DINASABKAN PADA AYAH ANGKAT (Studi
di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 04 November 2024

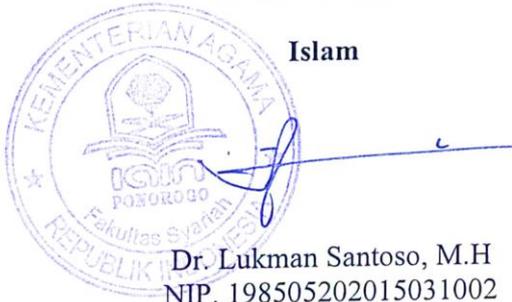
Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Pembimbing

Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002



Khaidarulloh, M.H.I.
NIP. 198612082020121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Ihsan Khoirudin
NIM : 101200088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Profesi Penghulu atas Pencatatan Perkawinan Anak Angkat yang Dinasabkan pada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

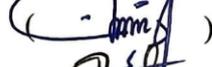
Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 November 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 27 November 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NID. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR IHSAN KHOIRUDIN

NIM : 101200088

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

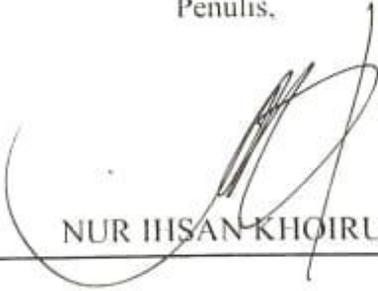
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS PROFESI PENGHULU ATAS PENCATATAN PERKAWINAN A
NAK ANGKAT YANG DINASABKAN PADA AYAH ANGKATNYA (STUDI
DI KUA KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 November 2024

Penulis,



NUR IHSAN KHOIRUDIN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ihsan Khoirudin
NIM : 101200088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS PROFESI PENGHULU ATAS
PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT
YANG DINASABKAN PADA AYAH ANGKAT (Studi
di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2024

Penulis,



Nur Ihsan Khoirudin
NIM: 101200088

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika di lihat melalui istilah normatif yang didasarkan hukum Islam, adopsi tidak menjadikan status anak tersebut sebagai anak kandung dari orang tua adopsi secara hukum, namun disini hanyalah melakukan pemeliharaan layaknya orang tua kandung seperti halnya memberikan kebutuhan yang diperlukan seperti dalam hal kebutuhan materi, sekolah baik formal maupun informal, serta hal-hal lain yang bersifat Imaterial seperti halnya anak kandung namun tidak berstatus anak kandung. dengan kata lain dia tetap menjalani hubungan darah dengan ayah kandungnya. ¹ Namun jika kita melihat adopsi yang berdasarkan NBW (*Nieuw Burgelijk Wetboek*) Buku I titel 12 Pasal 227, menyebutkan bahwa pengangkatan anak memutus nasab dengan orangtua biologisnya, maka disini terdapat dualisme hukum yang menjadikan adopsi anak memiliki dampak hukum yang berbeda.

Adopsi memiliki dua praktik dalam kehidupan: praktik pertama yakni mengadopsi anak milik orang lain guna diberikan kebutuhan materi, sekolah baik formal maupun informal, serta hal-hal lain yang bersifat Imaterial tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya meskipun kewajiban orang tua kandungnya dilakukan oleh orang tua angkat. kedua yakni mengangkat anak milik orang asing serta memberinya gelar sebagai anak kandung .²

¹ Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2014) , 65.

² Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) , 73.

Di Indonesia, praktik adopsi dilakukan dengan jalan mengikuti hukum yang ada, namun ada juga yang melakukan dengan melewati hukum yang ada. Pengangkatan melalui hukum yang ada atau secara legal, dilakukan dengan melalui jalan pengadilan negeri sehingga memiliki kekuatan hukum, di sisi lain jalan ini juga tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya karena berdasarkan Pasal 47 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa setelah disetujui oleh pengadilan dalam hal adopsi, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir sehingga dapat dilakukan penelusuran atas kejadian adopsi. Sedangkan pengangkatan anak yang melangkahi hukum dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan dan hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua angkat dan kandung untuk memanipulasi data otentik yang ada, sehingga orang tua angkat memiliki kesempatan untuk mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung melalui dinas terkait sejak bayi tanpa melalui putusan pengadilan negeri.³

Banyak orang tua angkat yang memanfaatkan celah adopsi dengan memberikan nasabnya kepada anak adopsinya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan untuk tetap menghubungkan nasab anak adopsi pada orang tua aslinya atau secara tidak langsung hal ini mensyaratkan untuk tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dengan mengubah nama setelah Bin atau Binti menjadi nama bapak angkat. Padahal hal tersebut merupakan dosa besar yang telah di tuliskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

³ Ibid., 73.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ غُفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴

Menurut imam Syafi’i, ayat di atas secara tersirat menegaskan jika pengangkatan anak tidak mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung, namun hanya menjadi seorang yang dirawat dan dibesarkan oleh orang tua angkat sampai si anak angkat mampu menjalani hidup secara mandiri, di samping itu ayat tersebut juga menyuratkan bahwa haram hukumnya bagi orang tua yang menasabkan anak angkat kepada dirinya sebagai anak kandung maupun sebaliknya.⁵

Pemanfaatan celah hukum yuridis terkait pengangkatan anak di Indonesia akan berpengaruh pada pencatatan pernikahan dimasa mendatang, yang mengakibatkan berkas kependudukan dalam pencatatan pernikahan seperti kartu keluarga, ijazah, bahkan akta kelahiran merujuk bapak angkat sebagai bapak kandung jika tanpa pengakuan dari yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan.⁶ Hal ini akan berakibat pada pencatatan nama Bin atau Binti setelah nama pengantin di buku nikah atau paling fatal dapat berakibat pada tidak sahnya

⁴ Kemenag. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022) 33:5.

⁵ Andi Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*(Jakarta: Kencana prenatala,2008),.116.

⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak.....*, 67.

akad pernikahan yang dilakukan dikarenakan salah satu rukun tidak sempurna. Di samping hal tersebut, pewarisan dimasa mendatang juga dapat bermasalah, dikarenakan anak angkat yang semestinya mendapatkan wasiat wajibah akan mendapatkan warisan layaknya anak kandung.⁷

Dalam menghadapi kasus tersebut, penghulu memiliki pilihan berdasarkan tugas dan fungsinya untuk menolak dalam proses Rafa' jika ditemukan keganjilan yang terdapat antar berkas. Namun dalam beberapa kasus, terdapat kejadian dimana data asal usul yang tidak sesuai karena dimanipulasi sejak anak lahir yang menjadikan seakan akan data tersebut sesuai kejadian asli, yang berakibat terhadap data dan fakta lapangan yang berbeda baru diketahui ketika adanya laporan dari pihak ketiga yang mengetahui fakta tersebut.

Di kantor urusan agama (KUA) seluruh Indonesia terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di mana penghulu tetap menikahkan anak angkat yang dinasabkan kepada bapak angkat tanpa mengubah berkas terlebih dahulu yang disesuaikan dengan fakta lapangan. Seperti halnya yang terjadi di Dari kasus yang pernah diteliti oleh Imro'atul, penghulu beralasan bahwa Jika mengubah data yang ada di pengadilan agama akan memakan banyak waktu, sehingga beberapa penghulu memutuskan untuk tetap menikahkan calon mempelai tanpa mengubah berkas atau meminta penetapan dari pengadilan agama terkait hal tersebut meskipun hal ini bertentangan dengan fakta yang ada dan berpotensi menimbulkan konflik dimasa mendatang yang berkaitan dengan waris.⁸

⁷ *Ibid.*, 68.

⁸ Imro'atul Toyibatul Mariah, Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

Tidak jauh berbeda dengan kebanyakan daerah di Indonesia lainnya, yang mana pencatatan pernikahan anak angkat yang dinasabkan pada bapak angkat, sehingga dalam pencatatan nama setelah “*Bin/Binti*” dalam berkas nikah dituliskan nama bapak angkat yang seharusnya bapak kandung, berdasarkan berkas yang ada, sehingga menimbulkan kerancuan di buku nikah yang mengakibatkan perbedaan antara praktik pernikahan dengan berkas pernikahan yang ada, juga terjadi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Hal tersebut dilakukan oleh pihak KUA karena mengacu pada seperti ijazah, akta kelahiran, serta Kartu keluarga. sehingga menjadikan akta nikah yang tercatat menjadi Bin atau Binti dari bapak angkat.⁹

Hal di atas kemudian menjadi polemik dikarenakan berpotensi terjadinya kerancuan data bahkan dapat dikatakan pemutusan nasab, serta dapat berdampak pada masalah dimasa mendatang. Di samping itu, keputusan penghulu dalam pencatatan pernikahan tersebut akan berpotensi bertentangan dengan kode etik profesi jika ditinjau dari hukum yang ada. dari dasar kasus yang terdapat di atas memiliki permasalahan menarik untuk dikaji dan diteliti, maka penulis ingin meneliti tinjauan kode etik penghulu terhadap penyelesaian kasus di atas dengan judul “ANALISIS PROFESI PENGHULU ATAS PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG DINASABKAN PADA AYAH ANGKAT (Studi di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)”.

⁹ Asrori, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 25 Februari 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis dan normatif profesi penghulu terhadap alasan pencatatan pernikahan anak angkat yang disebabkan pada Ayah Angkat oleh KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan hukum yuridis dan normatif terhadap praktik wali nikah pada pencatatan perkawinan anak angkat yang disebabkan pada ayah angkat di KUA Manguharjo Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dan normatif profesi penghulu terhadap alasan pencatatan pernikahan anak angkat yang disebabkan pada Ayah Angkat oleh KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum yuridis dan normatif terhadap praktik wali nikah pada pencatatan perkawinan anak angkat yang disebabkan pada ayah angkat di KUA Manguharjo Kota Madiun

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini bisa berguna bukan hanya untuk penulis secara pribadi, namun juga bermanfaat bagi orang lain baik dalam hal akademis maupun praktik.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bidang pengetahuan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perwalian terutama pada perwalian anak angkat berdasarkan hukum Islam.

- b. Dapat digunakan sebagai rujukan baik pada penelitian selanjutnya dalam bidang akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi tokoh agama maupun pihak yang berkecimpung pada ranah praktisi sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan anak angkat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan pengembangan serta perluasan pandangan lebih lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Hal itu dilakukan guna mendapatkan gambaran serta pertimbangan atas objek penelitian yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat mengembangkan penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini, di samping itu penelitian ini dapat memperluas cakrawala pandangan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Atas dasar itu, penulis telah mengumpulkan beberapa kajian pustaka terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi penulisan serta acuan dalam penulisan skripsi, antara lain:

Pertama, Desi Robiul Hidayah dalam skripsinya yang berjudul “Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”. Dengan rumusan masalah (1) bagaimana hak perwalian anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo (2) bagaimana hak kewarisan anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dengan

menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif serta didukung dengan teori hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dari akad oleh wali hakim sah dikarenakan tidak ditemukannya wali nasab yang berhak. Di samping itu si anak angkat juga tidak mendapatkan warisan dari bapak angkat karena statusnya memang anak angkat namun dapat digantikan dengan wasiat wajibah sebagai pertimbangan atas pembagian waris dimasa mendatang.¹⁰

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Desi Robiul hidayah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada cakupan kasus yang di jabarkan, di mana skripsi yang ditulis oleh Desi Robiul hidayah hanya berfokus pada satu kasus dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam sebagai kacamata dalam menganalisis kasus, sedangkan dalam penelitian ini melihat dari ketentuan profesi penghulu dalam menyelesaikan masalah anak angkat yang pernah terjadi di KUA kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagai perbandingan dengan bantuan hukum Islam sebagai pembanding.

Kedua, Imroatul Toyibatul Mariah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya (Studi Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Dengan rumusan masalah :(1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan yang mendasari penasaban anak angkat kepada ayah angkat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?(2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak penasaban anak angkat kepada

¹⁰ Desi Robiul Hidayah, Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo) *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2022)

ayah angkat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pembahasan deduktif yang mengimplementasikan teori hukum Islam yang meliputi nasab anak, pengangkatan anak dan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini menyebutkan (1) jalan keluar yang diambil oleh KUA Kecamatan Slahung tidak sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan surat Al-ahzab ayat 4-5.(2) terhadap dampak penasaban anak angkat kepada ayah angkat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo berpotensi mengganggu berjalannya pembagian waris dimasa mendatang karena adanya nasab orang tua angkat yang tertulis dalam berkas pendukung seperti buku nikah dan akta kelahiran.¹¹

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada teori yang digunakan. Yakni penelitian yang dilakukan oleh Imroatul lebih berfokus menggunakan teori hukum Islam yang ditekankan pada yang meliputi nasab anak, pengangkatan anak dan pencatatan perkawinan. sedangkan penyusunan yang akan dilakukan ini menggunakan teori profesi penghulu terhadap kasus yang ada dengan didukung teori pengangkatan anak, masalah nasab dalam hukum Islam, serta menggunakan perwalian.

Ketiga, skripsi hasil penyusunan oleh Annisa Alvi Nur Rohmah dengan judul “Penisbatan Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam(Studi Pandangan Tokoh Agama Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)”. dengan rumusan masalah 1.) Bagaimana Pandangan

¹¹ Imro'atul Toyibatul Mariah, Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2021)

Tokoh Agama terhadap Penisbatan Anak Zina Kepada Orang tua Angkat? 2.) Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Penisbatan Anak Zina Kepada Orang tua Angkat?. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori yuridis sosiologis dengan pola pikir analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan tokoh agama, hukum dari mengangkat anak itu boleh, namun penisbatan anak angkat tersebut keliru karena melanggar hukum Islam surat Al-Ahzab ayat 4.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dengan penelitian yang diteliti terdapat pada objek penelitian, di mana penelitian Anisa menggunakan objek anak zina dengan perspektif tokoh agama sedangkan objek yang digunakan oleh penyusun menggunakan objek anak angkat dengan menggunakan perspektif KUA serta tugas profesi terhadapnya. Di samping itu penyusunan ini juga menggunakan teori hukum Islam sebagai pendukung teori yang digunakan.

Keempat, Jurnal hasil penyusunan oleh Vita Firdausiah dengan judul “Status Anak Angkat dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif pustaka yang berfokus pada perbandingan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang anak angkat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Winda menyebutkan bahwa antara hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan, di mana pada hukum Islam nasab tetap pada ayah kandung baik dalam hal perwalian maupun pewarisan, dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

¹² Annisa Alvi Nur Rohmah, Penisbatan Anak Zina Kepada Orang tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara) *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak angkat tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya serta pengangkatan anak tidak memutuskan ikatan tersebut.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan Vita Firdausiah dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada penggunaan metode penelitian, di mana pada artikel dari Vita Firdausiah menggunakan metode komparatif pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dalam menggali data yang ada.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Enis Tristiana dengan judul “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif campuran yang mana memadukan antara penelitian lapangan dan pustaka dalam menggali data yang ada terkait proses pengangkatan anak serta dampak hukumnya dengan menggunakan teori hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pengangkatan anak yang perlu dilakukan dengan ke dinas sosial lalu penetapan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan data di dinas kependudukan dan catatan sipil.¹⁴

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Enis Tristiana dengan penelitian ini adalah terletak pada area penelitian, di mana penelitian yang

¹³ Vita Firdausiyah, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*,1.1(2023).

¹⁴ Enis Tristiana "Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7.1 (2023).

dilakukan oleh Enis Tristiana berfokus pada anak angkat yang dilakukan sesuai prosedur sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada anak angkat yang dilakukan tidak dengan prosedur yang sesuai hukum yang berlaku serta tinjauan profesi penghulu dalam memutuskan perkara.

Keenam, jurnal karya ilmiah hasil penelitian dari Elza Syarief dengan judul "Efektivitas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah Kua Kota Tanjung Pinang"¹⁵, dalam penelitian ini, penyusunan meneliti terkait dengan tanggung jawab penghulu dalam menjalankan tugasnya serta terkait dengan sanksi yang dapat diterima jika tidak sesuai dengan tanggung jawab, baik itu tanggung jawab administratif, tanggung jawab pidana, serta tanggung jawab perdata. untuk diteliti terkait dengan tugas serta tanggung jawab dari penghulu dalam menjalankan kewajiban yang diembannya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghulu masih terkendala dalam pemeriksaan Syarat formil dalam pendaftaran pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman calon mempelai, keterangan palsu, serta dokumen yang dimanipulasi.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ini adalah terletak pada kasus yang diteliti, jika penelitian sebelumnya berfokus pada kendala serta kemungkinan pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi, pidana, maupun perdata. penelitian ini berfokus pada keputusan penghulu atas kasus yang terjadi kemudian di bandingkan dengan hukum yang ada.

¹⁵ Elza Syarief, "Efektifitas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah Kua Kota Tanjung pinang", *Journal Of Law And Policy Transformation*.4.1 (2019).

Ketujuh, jurnal karya ilmiah yang disusun oleh Seilla Nur Amalia Firdaus dengan judul "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota".¹⁶ penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kuantitatif. dalam penelitian ini meneliti terkait praktik serta pengimplementasian PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen yang ada. dari hasil yang ditemukan, peneliti mendapat hasil bahwa, praktik dalam pemeriksaan berkas sudah dijalankan sesuai pada umumnya namun dalam pengimplementasian PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen yang ada masih kurang sesuai dikarenakan memaklumi jika salah satu pihak dari calon suami/istri maupun wali tidak ada ketika pemeriksaan berkas dilakukan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada kasus yang terjadi serta metode yang digunakan, yang mana penelitian terdahulu mengangkat kasus terkait dengan kesesuaian pegawai pencat nikah dalam melakukan pemeriksaan dokumen yang ada dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, serta menggunakan metode kualitatif lapangan, sedangkan penelitian ini akan meneliti terkait keputusan penghulu yang tetap menikahkan anak angkat yang dalam berkasnya dinasabkan pada ayah angkatnya yang akan ditinjau menggunakan undang-undang yang berkenaan dengan tugas serta fungsi penghulu.

¹⁶ Seilla Nur Amalia Firdaus, "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota" *Journal Of Islamic Law* 2.2, (2022)

Kedelapan, jurnal karya ilmiah hasil penyusunan dari Abdul Arif dengan judul “Peranan dan Fungsi Penghulu Dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah yang Transparan Menuju *Good Governance* di Kua Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara”¹⁷. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, penelitian ini meneliti terkait dengan tugas dan fungsi penghulu dalam melakukan pencatatan pernikahan yang transparan sehingga menuju ke arah *good governance*. Disamping itu penelitian ini juga meneliti terkait peran penghulu Di Kua Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan tugas dalam pencatatan nikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghulu di sana sudah menjalankan tugas dalam pencatatan nikah, rujuk, dan lain sebagainya dengan baik dan sesuai dengan asas *good governance*.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kasus yang terjadi, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti terkait apakah penerapan dari *good governance* yang dilakukan oleh penghulu sudah sesuai atau belum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada tinjauan hukum atas keputusan dari penghulu dalam menikahkan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk menemukan data valid secara ilmiah, sehingga dapat dikembangkan dan dibuktikan dengan ilmu

¹⁷ Abdul Arif, “Peranan dan Fungsi Penghulu Dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah yang Transparan Menuju *Good Governance* di Kua Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara” *AN-NAJAH (Jurnal Pengembangan dan Pembelajaran Islam)*3.1.(2024)

tertentu yang bertujuan digunakan sebagai sumber untuk memahami, mengatasi dan memecahkan masalah. Metode penelitian mencakup pada: ¹⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian lapangan yaitu data yang berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terkait gejala masyarakat yang pernah terjadi mengenai fokus penelitian. Data yang ada akan ditinjau berdasarkan hukum yuridis dan normatif yang ada kemudian di lihat berdasarkan tugas dan fungsi penghulu .

Adapun inti dari pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang analisis yuridis normatif dan profesi terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkat dalam studi di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

b. Pendekatan penelitian

Penulis memakai penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menurut Kirk dan Miller adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada masyarakat pada lingkungannya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁹ Sehingga dalam praktiknya,

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*,(Bandung:Alfabeta, 2016), 2.

¹⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002),3

peneliti akan melakukan pengamatan kasus pencatatan pernikahan anak angkat yang disebabkan pada ayah angkatnya.

Kemudian data dari kasus pencatatan pernikahan anak angkat yang disebabkan pada ayah angkatnya yang telah ditemukan dilapangan akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertumpu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan yang disahkan oleh pemerintah, serta peraturan lain yang berhubungan dengan norma yang hidup dalam masyarakat seperti halnya hukum Islam.²⁰

Di samping itu penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami gejala sosial dari sudut pandang atau perspektif informan. Informan ialah orang yang diajak wawancara, observasi, dimintai data, pendapat, pemikiran, serta persepsinya terkait pencatatan perkawinan anak angkat, yakni beberapa penghulu dan modin.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian yang dilakukan sangat penting, hal ini seperti yang diutarakan oleh Moleong bahwa kehadiran peneliti maupun pihak lain yang membantu dalam penelitian merupakan bagian paling utama dalam melakukan penelitian kualitatif.²¹

Dalam hal melakukan penelitian ini, peneliti hadir di lapangan sejak diizinkan melaksanakan penelitian, yaitu dengan mendatangi tempat penelitian

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*87.

pada waktu yang telah ditentukan maupun di luar waktu-waktu tersebut. Dengan cara mewawancarai penghulu untuk menggali data terkait pernikahan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya di KUA Manguharjo Kota Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih menjadi tempat penelitian oleh penyusun adalah KUA Manguharjo Kota Madiun. Peneliti melakukan penelitian disini dikarenakan terjadinya kasus pencatatan nikah anak angkat dengan nasab ayah angkatnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan segala fakta lapangan yang bersifat mentah kemudian dijabarkan melalui angka, huruf, gambar, grafik dan hal lainnya yang dapat diolah sehingga memperoleh hasil tertentu.²²

Terkait data yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan berupa:

- 1) Data terkait pencatatan nikah anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya yang terjadi di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- 2) Data pernikahan anak angkat yang wali orang tua angkat tidak diubah menjadi orang tua kandung maupun yang telah diubah sebelum pernikahan.

b. Sumber Data

²² Albi Anggito. *Metodologi penelitian kualitatif*.(Sukabumi:CV jejak,2018) 213.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, maka sumber data utama pada penelitian ini Sumber data inti di sini berasal dari perkataan atau pernyataan yang diungkapkan oleh subjek penelitian, sedangkan dokumen, literatur, dan lain-lain merupakan sumber tambahan serta penguat dari sumber data inti.²³ Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini di bagi menjadi dua sumber data, yakni primer dan sekunder, adapun data tersebut antara lain:

- 1) Data primer merupakan data yang bersumber dari subjek penelitian yang juga disebut informan. Data primer dikumpulkan guna untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.²⁴ Yang bersumber dari hasil wawancara kepada Asrori selaku kepala KUA Manguharjo, Agung Jatmiko selaku penghulu KUA Kecamatan Manguharjo, serta Parohadin dan makin selaku Modin KUA Manguharjo.
- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung jawaban yang diberikan oleh sumber primer, yang bersumber dari berkas pernikahan, buku serta literatur yang membahas tentang perwalian anak angkat, perundang-undangan dan Al-qur'an.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka penelitian ini condong pada bentuk natural, sumber data primer serta lebih

²³ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). 78

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram: Mataram University Press, 2020) . 89.

sering memakai wawancara, dokumentasi kemudian observasi sebagai teknik yang digunakan untuk menemukan data.²⁵

a. Observasi

Di sini penyusun mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan mengamati segala hal yang terkait masalah pengangkatan anak terutama pada praktik pencatatan perkawinan anak angkat di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

b. Wawancara

Di sini penyusun melakukan wawancara yang bersifat tanya jawab secara langsung pada Kepala dan penghulu KUA Manguharjo dan juga beberapa modin yang terkait dengan kasus yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang ada.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan dokumentasi foto sebagai bukti nyata bahwa peneliti telah terjun ke lapangan untuk menggali data kepada para informan yang ada sebagai sumber data primer.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah pertama dilakukan analisis pada data mentah yang ada. Analisis data dilakukan guna untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*. 225.

yang didasarkan pada suatu data yang ditemukan.²⁶ Metode deskriptif Kualitatif dipilih oleh penyusun sebagai jalan untuk menganalisis data yang ditemukan, agar bisa diuraikan dan digambarkan secara natural, sesuai fakta-fakta dan sifat-sifat beserta hubungan atau fenomena yang diteliti kemudian dianalisis. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu mendasar dari dalam nasab, pengangkatan anak kemudian hal tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus pada permasalahan keabsahan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkat berdasarkan studi perspektif KUA Manguharjo Kota Madiun yang ditinjau melalui hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data.

Perpanjangan pengamatan merupakan metode yang akan digunakan oleh penyusun untuk memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan dalam perpanjangan pengamatan adalah saat penyusun akan terjun ke lokasi penelitian lagi untuk menanyai informan baik itu yang sudah pernah ditanyai, maupun informan baru.²⁷ Dan juga dengan metode ini penyusun memeriksa kembali apakah data yang disampaikan oleh informan saling berkesinambungan atau tidak.

Untuk menghilangkan perbedaan yang ada pada data yang ditemukan dengan fakta yang ada, maka metode triangulasi data digunakan guna menyelaraskan fakta berdasarkan berbagai sudut pandang yang ada.²⁸ Dapat

²⁶ Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 134.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*,. 271.

²⁸ Ibid., 273.

dikatakan bahwa metode ini digunakan untuk memeriksa kembali data yang ditemukan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber metode atau teori. Untuk itu maka penyusun dapat melakukan dengan jalan:

- a. Mengajukan ragam pertanyaan
- b. Melakukan pemeriksaan ulang pada sumber data
- c. Menggunakan bermacam cara sehingga pemeriksaan ulang keaslian fakta dapat dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi acuan sehingga mempermudah selama proses pembuatan skripsi ini, di sini penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dari setiap bab yang ada kemudian dijadikan beberapa sub-bab yang mana pembahasan dari tiap bab dan sub-bab tersebut adalah komponen yang saling berkesinambungan antar tiap komponen. Sistematika pembahasan tersebut antara lain:

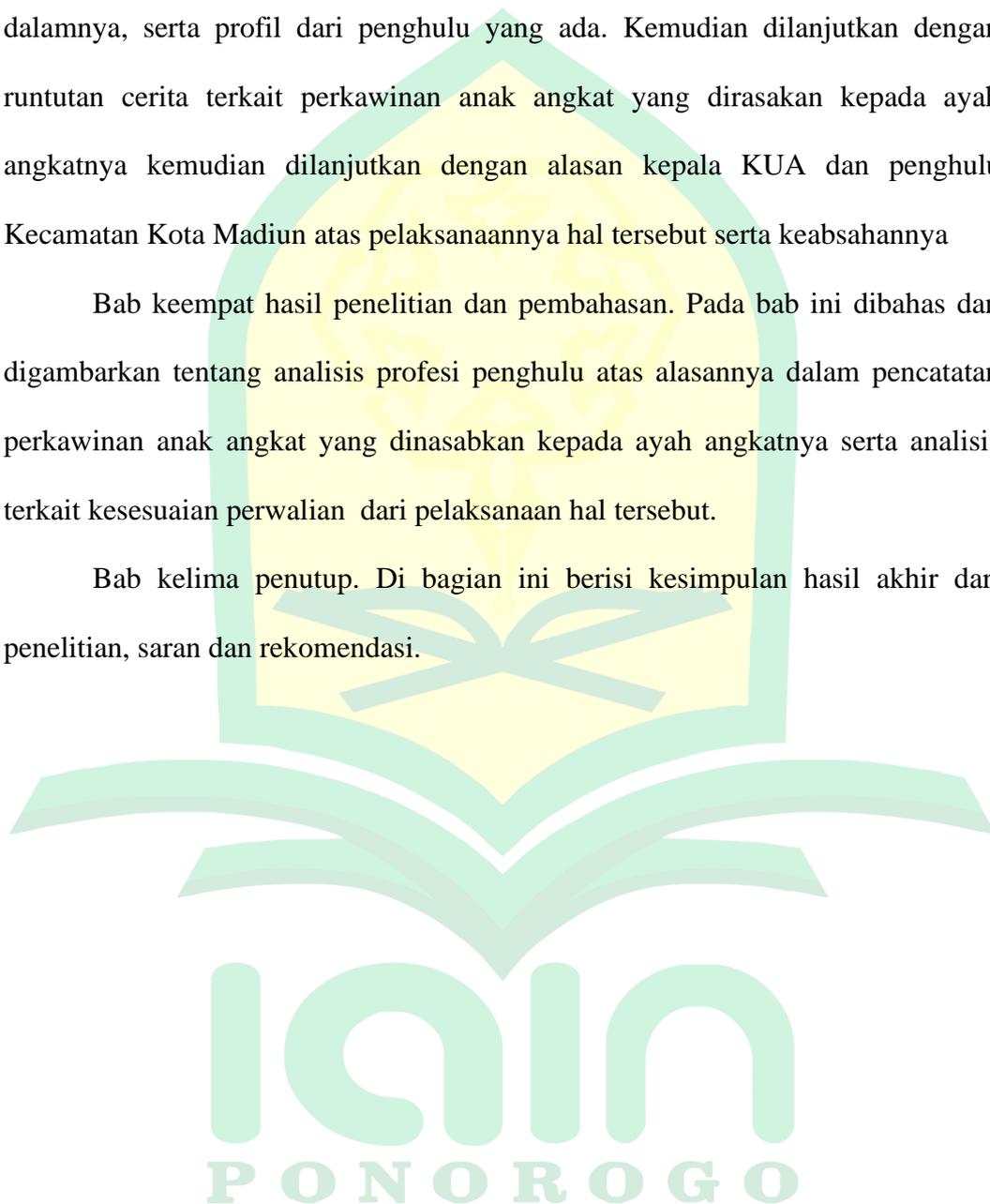
Bab pertama pendahuluan. Pada Bab pembuka ini nantinya akan ditampilkan hal yang bersifat sebagai gambaran ringkas pada tujuan penelitian ini. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua teori. Pada Bab ini penyusun akan memaparkan kumpulan dari teori-teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap fakta yang ditemukan saat penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Di sini, penyusun akan memaparkan teori nasab menurut normatif dan yuridis, adopsi anak menurut hukum Islam dan yuridis, tentang pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya kemudian akan ditambah dengan profesi penghulu dalam memutuskan perkara yang terjadi

Bab ketiga data. Disini penulis akan memaparkan tentang gambaran objek dasar penelitian yang memuat sekilas tentang KUA Manguharjo Kota Madiun, Visi dan Misinya, wilayah tanggung jawabnya, struktur kepegawaian yang terdapat dalamnya, serta profil dari penghulu yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan runtutan cerita terkait perkawinan anak angkat yang dirasakan kepada ayah angkatnya kemudian dilanjutkan dengan alasan kepala KUA dan penghulu Kecamatan Kota Madiun atas pelaksanaannya hal tersebut serta keabsahannya

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dibahas dan digambarkan tentang analisis profesi penghulu atas alasannya dalam pencatatan perkawinan anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkatnya serta analisis terkait kesesuaian perwalian dari pelaksanaan hal tersebut.

Bab kelima penutup. Di bagian ini berisi kesimpulan hasil akhir dari penelitian, saran dan rekomendasi.



BAB II

ANAK ADOPTSI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN

A. Nasab dan Adopsi Menurut Hukum Islam

1. Nasab

a. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologis berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*” yang artinya keturunan atau kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

²⁹ Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansāb* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mukminun ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”³⁰

Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *nasab* dan *shahr*, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam perspektif lain Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari’at.³¹

²⁹ Imro’atul Toyibatul Mariah, Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorogo,2021),.21.

³⁰ Kemenag. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022) 23: 101.

³¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan Maknanya*, (t.tp: Lentera Hati), 25:52.

Sedangkan secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas, ke bawah maupun ke samping.³²

b. Sebab Nasab

dalam hukum Islam, sebab terjadinya nasab seseorang terjadi karena tiga faktor :

1) Perkawinan yang sah

Para sarjana hukum Islam (ulama fikih) sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi

Hadith:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)". (HR. Muslim)

Para fuqaha menyepakati bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan menikah dengan akad yang sah dinasabkan kepada suaminya. Untuk hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama suami telah matang secara biologis (baligh). Kedua usia janin yang dikandung adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan.

Pendapat ini adalah menurut Mazhab Hanafi sedangkan menurut ulama

³² Andi Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008) 176.

selain Hanafi masa enam bulan terhitung sejak terjadinya persetubuhan suami istri tersebut. Ketiga adanya pertemuan antara suami istri tersebut adalah akad nikah.³³

Menurut az-Zuhaili adalah bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan Hadith “*al-waladu lil firsasy*” meskipun tidak terjadi kemungkinan persetubuhan antara suami istri tersebut. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak agar tidak terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk menjaga nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persoalan atas anak tersebut.³⁴

2) Nasab dari Perkawinan fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Menurut ulama Mazhab Hanafi pernikahan yang rusak yaitu 1) nikah tanpa saksi, 2) nikah mut’ah, 3) nikah dengan cara menghimpun lima wanita sekaligus, 4) nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya, 5) nikah dengan wanita yang telah mempunyai suami, 6) nikah dengan seorang mahram.

Sedangkan Mazhab Maliki bahwa macam-macam nikah fasid yaitu 1) nikah dengan mahram, 2) nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara, 3) nikah dengan istri sebagai istri kelima, 4) nikah mut’ah, 5) nikah dengan wanita yang masih dalam idah. Nikah fasid

³³ *Ibid.*, 176

³⁴ Sakirman, "Telaah Hukum Islam terhadap Nasab Anak". *Jurnal Studi Islamika*, 2 (2015), 365-366

menurut Imam Syafi'i adalah 1) nikah sigar, 2) nikah *mut'ah*, 3) nikah dalam masa ihram, 4) poliandri, 5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa idah, 6) nikah dengan wanita dalam keadaan hamil, 7) nikah dengan wanita non muslim, 8) menikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama, 9) menikah dengan lelaki kafir.

Sedangkan menurut Mazhab Hambali kategori nikah fasid yaitu 1) nikah sigar, 2) nikah *muhallil*, 3) nikah *mut'ah*, 4) nikah *mu'aqat*.

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, ulama fikih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu:³⁵

- a) Seorang laki-laki yang menjadi suami seorang perempuan telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya.
 - b) Telah melakukan persetubuhan secara nyata.
 - c) Anak dilahirkan dalam masa kehamilan lebih dari enam bulan setelah terjadinya persetubuhan.
- 3) Nasab anak dari hubungan sanggama syubhat

Kata as-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat

³⁵ Jamil, "Nasab dalam perspektif tafsir ahkam". *jurnal Al-Ahkam*, 1 (2016), 127

dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Yang dimaksud dengan sanggama syubhat adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Sanggama syubhat bisa terjadi karena kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu disanggamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya.³⁶

Jika syubhat tersebut menghasilkan anak maka nasab anak tersebut ditetapkan pada laki-laki yang melakukan syubhat dengan catatan jarak antara kejadian syubhat dengan kelahiran anak itu lebih dari enam bulan. Dan jika kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak dinasabkan pada laki-laki yang melakukan syubhat. Artinya, ada kemungkinan bahwa perempuan tersebut pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum kejadian syubhat. Namun jika lelaki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka nasab anak itu bisa ditetapkan padanya karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelum kejadian itu.³⁷

³⁶ Andi Alam, *Hukum pengangkatan anak* 185-186.

³⁷ *Ibid.*, 187.

c. Akibat yang Timbul dari Hubungan Nasab.

Perlu ditegaskan di sini bahwa nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan nasab adalah hubungan perdata dalam keluarga meliputi :

a. Dalam hal waris

Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu:³⁸

- 1) Hubungan kerabat (yang ada pertalian nasab) seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- 2) Hubungan Pernikahan. yaitu terjadinya akad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan sanggama antara keduanya. Adapun untuk pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- 3) *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Wala' oleh syariat digunakan untuk memberikan dua pengertian:
 - a) *Wala'* dalam arti pertama disebut dengan *wala'ul atawqah* atau '*ushubah sababiyah*, yakni ushubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.

³⁸ Saebani dan Djaliel, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 109.

b) *Wala'* dalam arti kedua disebut dengan *wala'ulmu'awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. Sebagai berikut, “Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang”. Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.³⁹

b. Hubungan Kekerabatan/Mahram

Mahram adalah orang yang haram dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi.⁴⁰

c. Hubungan Perwalian.

Hubungan nasab juga berakibat adanya hubungan perwalian dalam pernikahan. Mengenai keberadaan wali dalam pernikahan ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa wali merupakan rukun sahnya suatu pernikahan dan ada juga yang berpendapat bahwa nikah tanpa adanya wali masih tetap sah. Dalam perspektif fikih, wali terbagi dalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. Orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan

³⁹ *Ibid.*,109.

⁴⁰ Imro'atul Toyibatul Mariah, *Analisis Hukum.....*, 57.

calon mempelai perempuan. Jika tidak ada, baru berpindah kepada yang lebih berhak setelahnya kemudian kepada yang lebih jauh dan apabila tidak ada pula maka hak wali berpindah kepada hakim.⁴¹

2. Pengangkatan Anak.

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak atau adopsi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴² Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat mengasuh dengan tujuan agar seorang anak tersebut tidak sampai menderita atau terlantar dalam proses perkembangan serta pertumbuhannya⁴³

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, namun setelah kejadian itu masyarakat arab tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy,

⁴¹ *Ibid.*,58

⁴² Bernadetha Aurelia Oktavira, “Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/> (diakses pada tanggal 28 Juli 2024)

⁴³ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal dinamika hukum*.9.2(2009), 153.

putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggap sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.⁴⁴

Sebab adanya peristiwa tersebut, maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “4)Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴⁵

Dengan demikian, pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi hubungan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk

⁴⁴ Imro'atul Toyibatul Mariah, *Analisis Hukum*,.....,32

⁴⁵ Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022) 33:4-5.

saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi serta perwalian dalam pernikahan.⁴⁶

Menurut Wahbah Zuhaili, *At-tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *at-tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁴⁷

Syekh Mahmud Syaltut, dalam penelitiannya mengemukakan dua bentuk pengertian anak angkat yang berbeda yaitu.⁴⁸

- 1) *At-Tabannī* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.

⁴⁶ Andi Alam, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam.....*, 26.

⁴⁷ *Ibid.*, 27.

⁴⁸ *Ibid.*, 27–29.

2) *At-Tabbanī* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak sah.

b. Status Hukum Anak Angkat menurut hukum Islam

Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Mengadopsi seorang anak kemudian menjadikan status hukumnya sama dengan anak kandung merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur tentang pengangkatan anak, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Adopsi anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologisnya, dan tidak diperkenankan mengambil nasab dari ayah angkatnya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 5
- 2) Anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada jaman Jahiliah, hukum anak angkat dalam Islam tidak memperbolehkan anak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan saat orang tuanya meninggal dunia.⁵⁰

⁴⁹ Vita Firdausiyah, *Status Anak Angkat.....*,22.

⁵⁰ *Ibid.*,33

- 3) Anak angkat bukanlah mahram sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandungnya untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliah.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam ketentuan hukum Islam, pengangkatan anak termasuk ke dalam pengembangan pembahasan dari hukum hadanah atau pemeliharaan anak, yang membedakannya adalah pada hukum pengangkatan anak tidak mengubah status hukum pada nasab dan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkat, dan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian untuk masalah perkawinan atau pernikahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya.⁵¹

c. Status Hukum Anak Angkat menurut hukum positif

Perlu diketahui bahwa istilah adopsi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah pengangkatan anak. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 9 UU 35/2014 yang menyebutkan: “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain

⁵¹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Angkat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), 59.

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Anak angkat atau anak adopsi dalam hukum positif mempunyai status atau kedudukan hukum tersendiri. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan anak angkat dapat ditemui dalam beberapa peraturan di antaranya.⁵²

- 1) Staatsblad 1917, bab II pasal 7 (2) menyatakan bahwa anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung. Bunyinya sebagai berikut:

Dalam adopsi terhadap seorang keluarga, sah atau di luar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran.

- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi sebagai berikut “Pengangkatan anak menurut adat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
- 3) Buku I titel 12 Pasal 227 NBW (*Nieuw Burgelijk Wetboek*), menyatakan: Adopsi terjadi karena putusan pengadilan atas permintaan (permohonan) pasangan yang hendak mengangkat anak. Kemudian pada pasal 229 NBW menyatakan bahwa dengan

⁵² Vita Firdausiyah, *Status Anak Angkat.....*,22.

pengangkatan anak, maka anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya dan pengangkatan anak memutuskan hubungan hukum kekeluargaan antara anak yang bersangkutan dengan keluarga sedarahnya.

- 4) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³
- 5) Pasal 47 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa setelah ditetapkan oleh pengadilan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.⁵⁴

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak pada pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung, apabila hukum si anak baik hukum agama maupun hukum adat berlaku seperti itu. Tetapi di dalam NBW menyatakan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan sah dari orang tua angkatnya.

⁵³ *Ibid.*,23

⁵⁴ Musthofa Hasan, *Pengangkatan Anak Kewenangan.....*,56.

Hal ini karena hukum positif mengakui adanya pengakuan anak luar kawin.⁵⁵

Selain dijelaskan terkait hukum anak angkat dalam peraturan-peraturan di atas, dalam peraturan lain yang berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak yang tertulis dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa silsilah seorang anak yang sah hanya dapat dipastikan dengan akta kelahiran yang asli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil. Adapun pembuktian silsilah anak, terdapat dalam Pasal 55.⁵⁶

Perilaku orang tua yang mengangkat anak tanpa melalui jalur pengadilan dan dengan sengaja mengganti status anak yang diangkatnya menjadi anak sendiri menurut akta kelahiran anak yang diangkatnya, adalah suatu perilaku yang menjatuhkan norma hukum atau sama dengan melakukan kejahatan, jelas diatur dalam Pasal 93, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang didalamnya menyebutkan ancaman maksimal 6 tahun penjara atau denda lima puluh juta rupiah jika terjadi manipulasi data kependudukan.⁵⁷

Kemudian dalam peraturan lain yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak yang tanpa melalui jalur pengadilan dapat dikatakan sebagai anak

⁵⁵ *Ibid.*, 24.

⁵⁶ Kementerian agama, *himpunan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kemenag, 2015)

⁵⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

angkat ilegal. anak angkat sendiri dapat dikatakan sebagai anak angkat ilegal jika:⁵⁸

- 1) Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.
- 3) Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Sanksi pelanggaran terhadap poin 1, 2, dan 4 di atas berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Tuntutan pasal-pasal di atas dengan tegas menegaskan terjadinya pengadopsian akan menimbulkan pelanggaran hukum, contohnya yaitu pada berubahnya kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya untuk melakukan perawatan keseharian anak, dana untuk sekolah dan biaya kebutuhan lainnya yang dibutuhkan anak sebagaimana semestinya.⁵⁹

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁹ Musthofa Hasan, *Pengangkatan Anak Kewenangan.....*,77.

Kedudukan anak adopsi menurut syariat Islam berbeda dengan anak sendiri, anak adopsi dituliskan dengan nama ayah kandungnya atau dengan orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan darah, tidak memutuskan wali pernikahan untuk anak perempuan dan tidak menghilangkan hak saling mewaris dengan orang tua kandung anak tersebut.

B. Perwalian

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang mempunyai hak untuk menikahkan seseorang karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan, yaitu meliputi bapak, kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya, paman (saudara bapak yang laki-laki dari pihak bapak), anak laki-laki dari paman pihak laki-laki, dan hakim.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijab kabul dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah sepenuhnya wewenang wali, sehingga karena peranan wali yang sangat penting, maka adanya wali akan tetap dipertahankan dan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab yang berhak maka bisa digantikan dengan wali hakim. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan

⁶⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶¹

2. Macam-macam Wali Nikah

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh, maka tidak dapat menjadi wali.⁶² Sehingga imam Syafi'i mengelompokkan wali menjadi beberapa golongan di antaranya:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah dengan sebab hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'adl* (jauh). Yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah kandung, sedangkan yang termasuk wali *ab'adl* adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali *aqrab*, maka yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali *ab'adl*.

b. Wali Muhakkam

Wali *muhakkam* adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai dikarenakan wali nasab menolak atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, di sisi lain wali hakim atau penghulu tidak mampu bertindak sebagai wali.

c. Wali Mujbir

⁶¹ *Ibid.*, 99.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).78.

Wali *mujbir* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, belum mencapai umur, mumayiz, termasuk wanita yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Adapun yang dimaksud *ijbar* (*mujbir*) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan

d. Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali yang lebih jauh, yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian, tidak di tempat, berihram atau menolak menjadi wali, serta wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila ia mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada hakim (*penghulu*).⁶³

3. Kedudukan Wali Nikah

Adanya wali nikah dalam suatu akad nikah adalah suatu keharusan dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan dengan adanya wali. Wali tersebut berkedudukan atas nama pihak mempelai perempuan dan dapat juga berkedudukan sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁶⁴ Menurut jumbuh ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Mereka berargumen dengan hadis:

⁶³ *Ibid.*, 85.

⁶⁴ Rizky Nanda, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat", *Mizan*, 2.1, (2018). 70.

"Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).⁶⁵ Disamping itu, dalam sebuah riwayat dikatakan: "Wanita mana saja yang menikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah).⁶⁶

C. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara atau penghulu terhadap peristiwa perkawinan.⁶⁷ Peristiwa perkawinan adalah ketika pasangan suami istri melangsungkan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun nikah terpenuhi dan akan menghasilkan akta perkawinan sebagai bukti pernikahan secara administratif.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka tidak

⁶⁵ La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1 (2015). 50.

⁶⁶ *Ibid.*, 50.

⁶⁷ Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami," *Ilmiah Fenomena*, 1.1, (2016)

memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/buku nikah.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.⁶⁸

Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebagaimana firman Allah SWT:⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًىٰ فَآكْتُبُوهُ لِيَكْتُوبَ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ط

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Pada firman Allah SWT yang disebutkan di atas memerintahkan untuk mencatatkan secara tertulis pada setiap bentuk urusan mu'amalah, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya dan ayat tersebut menjelaskan bahwa alat

⁶⁸ Imroatul Toyibatul Mariah, *Analisis Hukum.....*, 44.

⁶⁹ *Ibid.*, 46.

bukti tertulis statusnya lebih adil dan menguatkan persaksian serta menghindarkan dari keraguan. Dari rujukan dasar hukum tersebut maka apabila dilihat dari *illat*-nya yaitu memiliki persamaan yang kuat antara akad nikah dan akad mu'amalah mengenai adanya mudharat apabila tidak adanya pencatatan sebagai alat bukti yang menunjukkan keabsahan akta tersebut⁷⁰

Menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam maka pernikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut juga beliau mengingatkan syarat *tawsiqy* yaitu syarat tambahan yang penting dalam sebuah pernikahan, bahwa pernikahan harus dicatitkan agar mengantisipasi bilamana terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dengan lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat terlindungi haknya dengan menunjukkan akta nikah/buku nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁷¹

Dalam menjalankan tugas pencatatan perkawinan, penghulu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, yang mana didalam-Nya memuat tugas dan fungsi penghulu yang tertulis dalam pasal 7, yang mana pada huruf D-F disebutkan

⁷⁰ *Ibid.*, 47.

⁷¹ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 33-34.

bahwa penghulu memiliki tugas dalam memeriksa, menerima, atau menolak terhadap pengajuan pernikahan maupun rujuk yang diajukan.⁷²

2. Dasar Pencatatan Perkawinan

Hukum Islam tidak menyebutkan dasar yang jelas pada kewajiban dalam pencatatan pernikahan, syariat hanya menganjurkan terhadap perayaan walimah. Pencatatan pernikahan diimplementasikan dari hukum muamalah yang berkaitan dengan jual beli. Dalam hukum positif, pencatatan perkawinan didasarkan pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan pada ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perlu dilakukan agar melindungi hak-hak keperdataan yang ada.⁷³

Pencatatan tersebut nantinya akan melahirkan akta nikah yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian nikah. Adapun isi akta nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal suami istri, apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka disebutkan nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua.
- c. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya”.
- d. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pengab bagi Anggota Angkatan Bersenjata.
- e. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- f. wali nikah. Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal para saksi.

⁷² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

⁷³ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 30.

- g. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.⁷⁴

Mengingat begitu pentingnya akta perkawinan ini karena dengan akta ini dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran anak maupun paspor, dan tentunya juga sebagai akta yang berkekuatan hukum, maka seharusnya dalam menuliskan akta nikah harus sesuai dengan keadaan riilnya, mulai dari nama, nama orang tua, agama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah.

D. Pegawai Pencatat Nikah

1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “hulu” yang berarti kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala khusus yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.⁷⁵ Istilah penghulu dalam Bahasa Indonesia bermakna tiga: pertama, penghulu sebagai pejabat agama seperti di Jawa; kedua, penghulu sebagai kepala adat seperti di Minangkabau; dan ketiga penghulu sebagai kepala kampung seperti di Indrapura (Riau). Istilah penghulu di Palembang mengikuti di Jawa (pengulu) dan di Sunda (pangulu). Artinya penghulu sebagai pemimpin yang mengurus masalah-masalah agama, sedangkan di Minangkabau disebut khatib imam dan di Bugis disebut *parewa sara*.⁷⁶

⁷⁴ Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, t.tp, t.th, 28.

⁷⁵ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka. 2007)., 850.

⁷⁶ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat agama dan masa kesultanan dan kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998)101.

Pada masa sebelum kemerdekaan, Penghulu secara umum dalam kedudukannya memiliki otoritas dalam semua urusan yang berhubungan dengan agama Islam, terutama dalam pelaksanaan syariah. Fungsi penghulu sebagai wakil raja dalam urusan keagamaan pada saat itu memiliki tugas untuk mengelola masjid, bertindak sebagai wakil wali dalam perkawinan, sebagai hakim dalam persoalan keluarga dan harta warisan, memberi nasihat tentang masalah keislaman, mengajarkan agama, dan penghulu juga berperan sebagai da'i.⁷⁷

Akan tetapi pada masa kolonial Belanda, Penghulu ditarik ke dalam lingkaran elite pemerintah sehingga peran mereka disesuaikan dengan kehendak pemerintah kolonial. Pengawasan umat Islam dengan menjadikan penghulu sebagai pegawai pemerintah waktu itu bertujuan untuk memisahkan umat Islam dengan politik serta guna untuk mengurangi peran hukum Islam di tengah masyarakat yang semestinya dijembatani oleh penghulu. Pengertian penghulu dalam konteks ini adalah pegawai pemerintah yang diberi hak dan tanggung jawab secara penuh oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan dan pencatatan perkawinan atau rujuk serta melaksanakan kegiatan kepenghuluan lainnya yang cakupannya tidak seluas pada masa sebelum kolonial.⁷⁸

2. Dasar Hukum Pegawai Pencatat Nikah

Dasar-dasar hukum kepenghuluan diantaranya adalah :⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*, 107.

⁷⁸ *Ibid.*, 127-129.

⁷⁹ Yufi Wiyos Rini, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014),. 3.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1954 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/N.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

3. Tugas dan Fungsi Pegawai Pencatat Nikah

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 huruf e PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PNN, bahwa kepala PNN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah kepala subseksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota madya, kewajiban penghulu adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah.⁸⁰

Berdasarkan BAB II Pasal 4 Peraturan Menpan Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Kepenghuluan dan Angka Kreditnya, tugas pokok penghulu adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- b. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;

⁸⁰ Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan.....*,45.

⁸¹ Ikmal Hafif, "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah)" *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Vol. 3, no. 1 (2022).

- c. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
- d. Penasihat dan konsultasi nikah/rujuk;
- e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
- f. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- g. Pembinaan keluarga sakinah;
- h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan;
- i. Pengembangan kepenghuluhan.

Peraturan direktur jendral Bimas Islam No. Dj.II/426 tahun 2008 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu, tugas pokoknya adalah: ⁸²

- a. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluhan,
- b. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk,
- c. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk,
- d. Penasihat dan konsultasi nikah/rujuk,
- e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk,
- f. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah,
- g. Pembinaan keluarga sakinah,
- h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan dan pengembangan kepenghuluhan.

Selain itu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah tidak terlepas dari pedoman dasar hukum pencatatan nikah sebagaimana tercantum dalam PMA No. 11 Tahun 2007 jo PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. yang meliputi :⁸³

Pasal 1 ayat 3 menyebutkan: “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.”⁸⁴

Pasal 1 ayat 5 menyebutkan: “Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan

⁸² Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan.....*,701.

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 j.o. Peraturan Mahkamah Agung No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

⁸⁴ *Ibid.*,

bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.”⁸⁵

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan pegawai pencatat nikah memeriksa berkas nikah dari calon mempelai, antara lain:⁸⁶

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto kopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari kua kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

Pasal 7 menyebutkan⁸⁸ “(1.) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana yang dimaksud tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak; (2.) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.”⁸⁹

Dapat dikatakan jika terdapat ketidaksesuaian antar berkas yang ada maupun berkas bertentangan dengan undang-undang maupun hukum Islam maka penghulu dapat melakukan penolakan disertai dengan surat penolakan nikah, yang nantinya dapat digunakan untuk mengajukan kepada pengadilan agama untuk diselesaikan atau dimintai permohonan terkait jenis penolakan yang ada agar ditinjau dan diselesaikan oleh pihak pengadilan agama.

Di samping tugas dan fungsi yang diatur di atas, penghulu juga berpedoman pada kode etik yang diatur dalam Surat Keputusan MUNASLUB APRI Nomor: 01/KPTS/MUNASLUB-APRI/I/ 2014 tentang Kode Etik Profesi Penghulu. Dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan dasar penghulu dalam bersikap adalah :⁹⁰

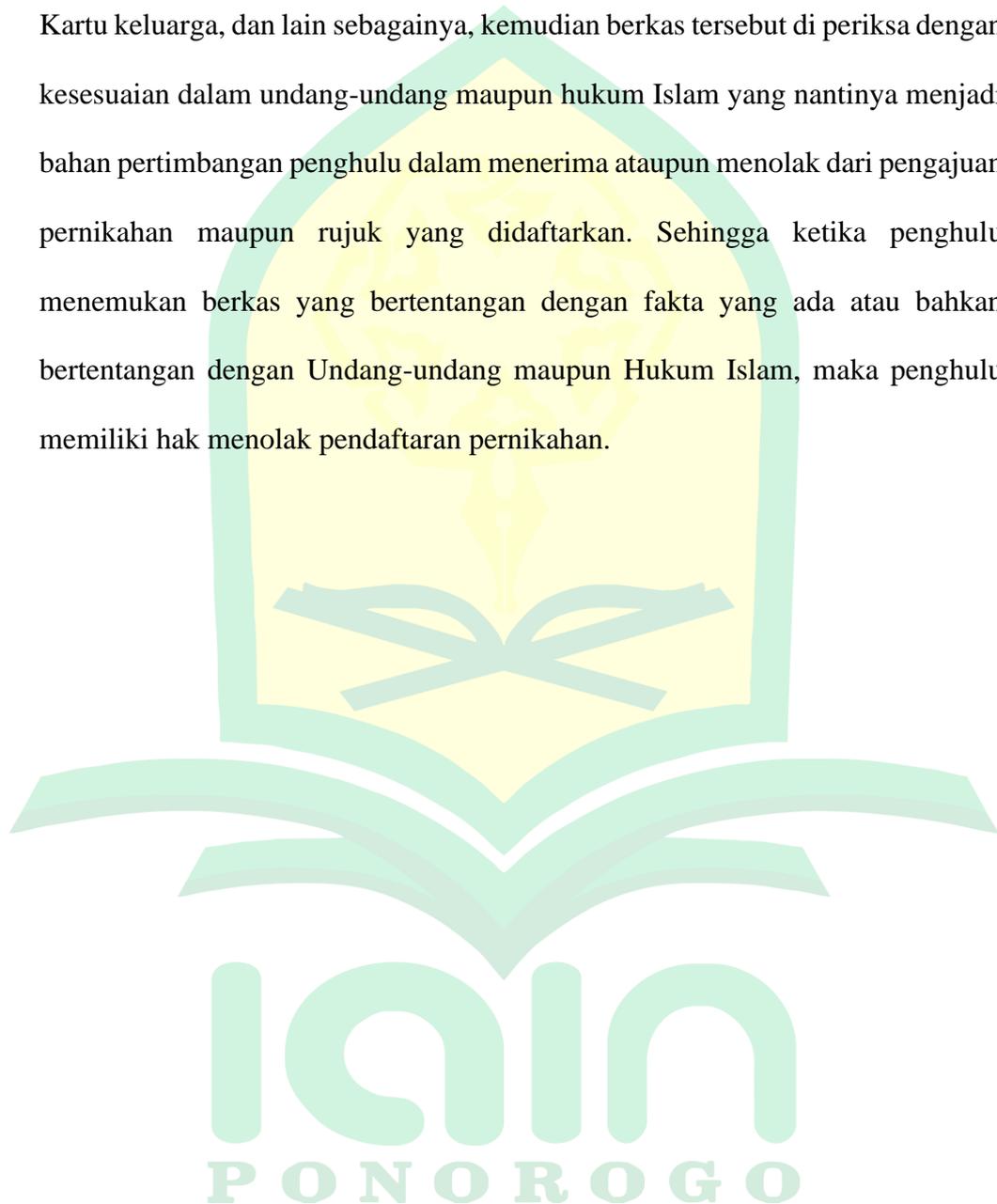
- a. Disiplin
- b. Adil dan bijaksana dalam menentukan sebuah kaidah-kaidah hukum munakahat
- c. Memberikan keputusan secara obyektif dan mengesampingkan kepentingan salah satu pihak dengan berpegang teguh pada kaidah-kaidah Ushul Fiqh dan Fiqhiyyah;
- d. Mengutamakan pelayanan masyarakat yang sejalan dengan Peraturan perundang-undangan.

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Surat Keputusan MUNASLUB APRI Nomor: 01/KPTS/MUNASLUB-APRI/I/ 2014 tentang Kode Etik Profesi Penghulu.

Berdasarkan tugas dan fungsi dan penghulu di atas dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas pencatatan perkawinan yang terjadi, penghulu menggunakan dasar berkas kependudukan yang ada seperti KTP, akta kelahiran, Kartu keluarga, dan lain sebagainya, kemudian berkas tersebut di periksa dengan kesesuaian dalam undang-undang maupun hukum Islam yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penghulu dalam menerima ataupun menolak dari pengajuan pernikahan maupun rujuk yang didaftarkan. Sehingga ketika penghulu menemukan berkas yang bertentangan dengan fakta yang ada atau bahkan bertentangan dengan Undang-undang maupun Hukum Islam, maka penghulu memiliki hak menolak pendaftaran pernikahan.



BAB III

PENCATATAN NIKAH ANAK ANGKAT YANG DINASABKAN PADA AYAH ANGKAT DI KUA MANGUHARJO

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo

Berdirinya KUA kecamatan Manguharjo diawali dengan berdirinya KUA kota madiun pada 1951 yang mencakup tiga kecamatan yang meliputi Taman, Kartoharjo, dan Manguharjo. Awalnya Kantor urusan agama ini berlokasi di masjid agung Baitul Hakim Kota Madiun yang berlokasi di Jl. Aloon-Aloon Barat, Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dikarenakan masjid agung Baitul Hakim dinilai menjadi pusat dakwah Islam pada waktu itu dan juga letaknya strategis, yang mana berlokasi di tengah dari ketiga kecamatan yang ada, sehingga memudahkan akses pada kala itu.⁹¹

Penempatan KUA menjadi satu ini terus berlangsung hingga terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor

⁹¹ KUA Manguharjo, *Profil KUA Manguharjo*, (Madiun: tp, 2023), 2

Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Setelah keluarnya peraturan tersebut, KUA Kota Madiun akhirnya dipecah sesuai dengan tiga kecamatan yang ada.⁹²

Setelahnya, KUA Manguharjo berlokasi di Jl. Pajajaran No. 32, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Pada kala itu KUA Kecamatan Manguharjo meminjam Bangunan pemerintah kota Madiun hingga tahun 2020, namun dikarenakan bangunan yang dinilai sudah mulai tidak layak dan pihak KEMENAG Kota Madiun tidak memiliki hak untuk melakukan renovasi, akhirnya pihak KUA Menyewa kantor yang terletak tidak jauh dari lokasi awal, yang hanya berjarak dua gedung ke arah timur dari lokasi awal. Hal ini dipilih agar memudahkan masyarakat dalam menemukan KUA yang telah berpindah lokasi.⁹³

Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 65 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 65 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 20C hingga 35C. Kecamatan Manguharjo memiliki luas daerah 12,54 Km, yang berbatasan dengan Kecamatan Kartoharjo sebelah timur, Kecamatan Taman dari sebelah timur, kemudian juga Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebelah barat. Kecamatan Manguharjo terdiri atas 9 kelurahan. Yakni Manguharjo (1,42km), Sogaten

⁹² *Ibid.*, 3

⁹³ *Ibid.*, 4.

(1,14km), Patihan (0,84km), Ngegong (1.36km), Winongo (2,00km), Madiun lor (0,74km), Pangongangan (0,61km), Nambangan lor (0,90km), Nambangan Kidul (1,03km).⁹⁴

Dari awak berdirinya, KUA Kecamatan Manguharjo mengalami pergantian kepemimpinan hingga sekarang, yang diantaranya:⁹⁵

N O	N A M A	MASA BAKTI
1	Rosjidi, BA	1986 –
2	M. Tubani, BA	1987 – 1990
3	Djayadi, BA	1990 – 1996
4	Drs. Kaslim Al Solichun	1996 – 1997
5	Husnuddin, BA	1997 – 2001
6	Ahmad Dul Rosyid, BA	2001 – 2003
7	Mustafit Effendi, BA	2003 – 2008
8	Moch. Arif Fauzi, S. Ag	2008 – 2013
9	Tri Suryatmoko, S. Ag	2013 – 2018
10	Amil Wahib, S. Ag	2018 – 2020
11	H. Pujiyanyto, S. Ag, M. Hi	2020 – 2023
12	Asrori, S. Ag	2023 - Sekarang

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan KUA Manguharjo Kota Madiun di masa mendatang. Sehingga Visi dari KUA Manguharjo Kota Madiun adalah :
 “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Manguharjo Taat beragama, Rukun, Cerdas, mandiri dan Sejahtera lahir batin”⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*,4

⁹⁵ *Ibid.*,6

⁹⁶ *Ibid.*, 5

Untuk mewujudkan Visi yang dimiliki oleh KUA Manguharjo, maka

KUA Manguharjo memiliki Misi :⁹⁷

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi dan manajemen
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan di bidang kemasjidan dan tempat ibadah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan haji dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial
6. Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal
7. Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat Islam (arah kiblat, jadwal Shalat)
8. Memberikan informasi tentang pelayanan haji
9. Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Manguharjo.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo

a. Pegawai KUA⁹⁸

NO	Jabatan	Nama
1.	Kepala KUA	Asrori, S.Ag
2.	Penghulu	Agung Jatmiko, S. Kom.I. Abdul Aziz Setyo Budi S.Ag.
3.	Bendahara	Muhamad Salisul Adha, S.H.
4.	Sekretaris	Zumaroch Hikmawana, S. Sos
5.	Surat Menyurat	Joko Santoso
6.	Penyuluh Fungsional	Siti Hamdanah, S. Ag. Wiwin Nur Haidah, S.S Siti Juwariyah Mustaqim Andi Yugo Warsono S.Pd Titik Sulastri Shodiqin Zainal Arifin Fi`krisna Setiawan
7.	Pegawai Tidak Teta	Rohman Yudha Pramanto Desa Fitri Masinta Dewi, S. Pd

⁹⁷ Ibid.,5

⁹⁸ Ibid.,7

b. Modin/Pembantu PPN: ⁹⁹

No	Nama	Wilker Desa
1.	Mudzakir	Manguharjo
2.	Qomarudin	Manguharjo
3.	Yasin	Sogaten
4.	Jusuf	Patihan
5.	Trianto	Patihan
6.	Makin	Ngegong
7.	Munawar	Winongo
8.	H.M. Suyoto	Winongo
9.	Karoman	Madiun Lor
10.	Yaskin	Madiun Lor
11.	Zainal Abidin	Pangongangan
13.	Imam Gusyanto	Nambangan Lor
14.	H. Parohadin	Nambangan Kidul

B. Profil penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo

1. Asrori, S.Ag.

Pak Asrori merupakan penghulu KUA Manguharjo yang memiliki tugas fungsional sebagai kepala KUA dengan golongan pegawai Penata Tingkat 1 atau III D. Beliau lahir di Ngawi pada 10 April 1969 dengan pendidikan formal MI Ngamban, MTS Takeran, MA Takeran, dan S1 di IAIN Sunan Ampel dengan Program studi Syariah. Mulai menjadi penghulu semenjak 2003 di Kota Madiun.¹⁰⁰

2. Agung Jatmiko, S.Kom. I.

Pak agung jatmiko merupakan penghulu muda dengan tingkat golongan Penata Muda Tingkat I atau III B. Beliau lahir di Magetan pada 27 November 1974, dengan pendidikan formal MI Nguri, MTsN Rejosari, MAN Kembang Sawit, dan S1 di INSURI Ponorogo dengan program studi Dakwah.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*, 8

¹⁰⁰ *Ibid.*, 9

¹⁰¹ *Ibid.*, 10

3. Abdul Aziz Setyo Budi, S.Ag.

Pak Abdul Aziz merupakan penghulu muda dengan tingkat golongan Penata Muda Tingkat I atau III B. Beliau lahir di Ponorogo pada 14 Oktober 1980, dengan pendidikan formal SDN Jetis, MTs Al-Islam, MA Al-Islam dan melanjutkan pendidikan S1 di STAI Ponorogo dengan program studi dakwah pada fakultas Usuluddin.¹⁰²

C. Pernikahan Anak Angkat yang Dinasabkan Kepada Bapak Angkat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo

1. MM dan YM

Saudara MM dan saudari YM merupakan mempelai yang menikah pada 16 Oktober 2022 di rumah saudari YM yang berlokasi di kelurahan Nambangan Kidul. Waktu itu rencananya pada saat pengajuan berkas nikah YM akan diwalikan langsung oleh wali nasabnya yakni SG yang merupakan ayah dari YM. kehendak nikah diajukan kepada KUA Manguharjo yang merupakan lokasi kewenangan dari wilayah kelurahan Nambangan Kidul yang termasuk dalam teritorial hukum Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Awalnya setelah berkas masuk dan dilaksanakan prosesi Rafa' oleh pak Asrori beberapa hari sebelum diadakan pernikahan tidak ditemukan berkas yang mencurigakan baik semua berkas pendukung maupun berkas N2 dengan N4 sudah sesuai. Namun pada saat dilaksanakan pernikahan pak Parohadin mendapatkan informasi dari pihak keluarga jauh bahwa saudari

¹⁰² *Ibid.*, 10

YM merupakan anak angkat. pada kala itu petugas pencatat nikah adalah Bapak Asrori dengan modin Parohadin.

“waktu itu ketika hari akad saya datang ke rumah mempelai, ada beberapa keluarga jauh dari saudara YM yang memberikan informasi pada saya bahwa YM merupakan anak angkat dan bukan anak kandung, padahal saat saya mengantarkan untuk mengurus berkas dan Rafa’, dari berkas yang ada dan pengakuan dari orang tuanya sendiri mengatakan itu merupakan anak kandung.”¹⁰³

Pak Parohadin yang merupakan petugas pembantu PPN atau modin menjelaskan bahwa YM ini merupakan pindahan dari kota Semarang pada 2007 dan menempati rumah neneknya, sehingga beliau tidak terlalu dekat dan tidak mengetahui jika saudara YM merupakan anak angkat dari kedua orang tuanya. Barulah ketika pada hari akad dan keluarga jauh dari saudara YM berkumpul, pak Parohadin baru diberitahu bahwa saudara YM merupakan anak angkat.

“YM sekeluarga ini memang baru menempati rumah di Kecamatan Manguharjo pada tahun 2007, sehingga saya kurang mendapatkan informasi asli terkait asal usul dari YM”¹⁰⁴

Setelah pak Parohadin mendapatkan informasi dari keluarga jauh saudara YM bahwa ternyata saudara YM merupakan anak angkat. pak Parohadin kemudian menyampaikan informasi tersebut pada pak Asrori yang merupakan Penghulu yang bertugas pada waktu itu saat pak Asrori sudah berada di lokasi akad. Hal ini dilakukan karena pak Parohadin mendapatkan informasi baru saat beliau datang ke rumah mempelai.

“ketika akan diadakannya proses pernikahan ada beberapa keluarga jauh yang memberikan laporan pada pak modin bahwa anak yang seharusnya dinikahkan dengan wali nasab pada waktu itu yang ternyata

¹⁰³ Parohadin, *Hasil Wawancara modin*, Kota Madiun, 11 Oktober 2024.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

merupakan anak angkat. Mengetahui hal tersebut, pak modin melaporkan fakta tersebut pada saya selaku penghulu yang bertugas pada waktu itu.”¹⁰⁵

Setelah pak Asrori mendapatkan informasi dari Pak Parohadin selaku modin, pak Asrori mencoba menanyakan langsung pada keluarga besar dan mereka mengiyakan bahwa YM merupakan anak angkat. Namun saat menanyakan pada orang tua YM mereka tetap kekeh bahwa YM merupakan anak kandung mereka. Akhirnya pak Asrori langsung menghubungi pak Pujianto selaku Kepala KUA pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“saya mencoba mencari informasi sendiri dari beberapa keluarga jauh terkait kebenaran fakta yang diberikan pak Parohadin. Pihak keluarga besar mengiyakan bahwa YM merupakan anak angkat, namun orang tua YM tetap kekeh bahwa YM merupakan anak kandung. Karena kejadian pada waktu itu membutuhkan keputusan langsung dari kepala KUA, maka saya menyerahkan kasus tersebut pada Pak Pujianto untuk menyelesaikan masalah tersebut.”¹⁰⁶

Pada akhirnya setelah melakukan perbincangan panjang dengan orang tua angkat mempelai perempuan dan beberapa keluarga dari mempelai perempuan, pernikahan tersebut tetap dilaksanakan meskipun menggunakan wali hakim dan pada buku nikahnya tetap dituliskan BINTI ayah angkat dari saudari YM. Keputusan ini dilakukan Pak Pujianto dengan memperhatikan beberapa sebab. Menurut pak Asrori sebab pertama adalah kesesuaian antara berkas N2 tentang asal usul anak dan N4 tentang keterangan tentang orang tua.

“Saat dilakukan proses pemeriksaan berkas atau Rafa’, berkas pernikahan N2 dan N4 sudah sesuai, meskipun ternyata data tersebut bertentangan dengan fakta lapangan yang di ungkapkan oleh saudara

¹⁰⁵ Asrori, *Hasil Wawancara penghulu*, Kota Madiun, 9 Oktober 2024.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

jauh dari saudari YM bahwa saudari YM merupakan anak angkat dari si wali nasab yang tertulis dalam buku nikah.”¹⁰⁷

Kemudian pak Asrori melanjutkan bahwa meskipun faktanya YM merupakan anak angkat namun berkas yang ada berkesuaian menunjukkan bahwa YM adalah anak angkat. Kemudian dari pengakuan pak Asrori, keluarga besar dan ayah dari saudari YM mengatakan bahwa YM diambil dari panti asuhan yang terletak di Semarang, dan kala itu kabarnya panti asuhan telah tidak beroperasi lagi sehingga tidak memungkinkan untuk dicari berkas asli silsilah dari YM.

“Waktu itu saat kami minta keterangan dari Ayah angkat dan saudara jauh YM, mereka menjelaskan bahwa, Ayah kandung dari saudari YM tidak mungkin diketemukan keberadaannya dikarenakan YM ketika bayi dipungut dari panti asuhan yang saat pernikahan tersebut terjadi panti itu sudah tidak ada lagi kata mereka.”¹⁰⁸

kemudian selain dua sebab yang telah disebutkan di atas, pak Asrori kemudian menambahkan bahwa sebab ketiga yang menjadi pertimbangan pada waktu itu adalah kasus terjadi saat hari akad yang menjadikan akta nikah sudah terlanjur tercetak dan memerlukan beberapa waktu untuk merubahnya, selain itu para tamu undangan juga sudah mulai berkumpul sehingga jika tidak segera diberikan solusi maka akan menjadikannya perbincangan di belakang.

“Bagaimanapun juga waktu itu merupakan hari akad dari kedua mempelai tersebut, sehingga disamping buku nikah yang sudah terlanjur tercetak, pak Pujiyanto melihat bahwa tamu undangan kala itu sudah mulai berkumpul dan akan menjadi masalah lebih besar jika tidak jadi dilaksanakan.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

Berdasarkan ketiga dasar yang digunakan pada waktu itu, pernikahan antara MM dan YM tetap dilaksanakan pada 16 Juli 2022 sesuai dengan rencana awal. Namun dalam pernikahan yang pada awalnya akan menggunakan wali nasab sebagai walinya, diganti menjadi wali hakim, namun dalam buku nikah tidak disebutkan alasan mengapa menggunakan wali hakim. Disisilain Pada nasab di buku nikah YM tetap dituliskan Binti SG sebagai ayah, meskipun pada waktu itu SG terindikasi bukan ayah kandung.

“Akhirnya pernikahan tetap kami laksanakan dengan atas dasar yang ada, dengan menggunakan wali hakim namun tidak disebutkan alasan menggunakan wali hakim pada buku nikah. Terkait masalah nasab juga dinasabkan pada ayah angkatnya”¹¹⁰

Setelah pernikahan antara MM dan YM dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan di atas, kedua orang tua dari YM diminta untuk datang ke KUA Manguharjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan semisal bisa ditemukan titik terang maka datanya bisa diubah. Namun ibu dari YM tetap kekeh bahwa YM merupakan anak kandung mereka, meskipun pada akhirnya ayah YM yakni SG mengakui bahwa YM merupakan anak angkat seperti yang diutarakan beberapa keluarganya ketika hari akad nikah.

“Meskipun pernikahan tetap dilaksanakan pada hari itu, kedua orang tua angkat dari saudari YM di minta datang ke KUA sehari setelah pelaksanaan pernikahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai asal usul asli dari saudari YM. Dari hasil investigasi yang saya lakukan pada waktu itu, ayah dari YM mengakui bahwa YM merupakan anak angkat, namun ibu dari YM tetap kekeh mengatakan bahwa YM merupakan anak kandungnya. Setelah pemanggilan tersebut, KUA tidak mengubah buku nikah yang telah dicetak dan

¹¹⁰ *Ibid.*,

tidak memperpanjang masalah tersebut. Karena kesepakatan dengan pihak orang tua”¹¹¹

2. AN dan AJ

Pernikahan antara saudara AN dan saudari AJ terjadi pada 12 Juli 2023 di kelurahan Ngegong. rencananya AJ akan diwalikan oleh wali nasab yakni TK sebagai ayah kandung AJ. Saat Rafa’ Pernikahan tersebut akan dilaksanakan di rumah saudari AJ yang merupakan warga asli dari Kelurahan Ngegong yang merupakan bagian hukum dari KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Saat berkas masuk beserta dengan kehendak nikah oleh AN dan AJ bersama orang tua masing-masing mempelai dan mbah modin, berkas yang masuk sudah berkesesuaian dan bisa langsung menuju proses Rafa’ menurut pak Aung. Namun beberapa hari sebelum diadakannya proses Rafa’, ada seorang tokoh agama dari kelurahan Ngegong yang mengaku sebagai tetangga dari saudari AJ datang ke KUA dan memberikan keterangan bahwa AJ merupakan anak angkat dan bukan anak kandung.

“Pada kala itu beberapa hari sebelum dilaksanakan pengecekan berkas, kami di datangi oleh tokoh agama setempat yang mengaku merupakan tetangga dari saudari AJ yang datang ke KUA dan mengatakan bahwa merupakan anak angkat. Padahal dalam berkas N2 dan N4 menyebutkan bahwa saudari AJ merupakan anak kandung dari orang tuanya.”¹¹²

Untuk meyakinkan keterangan dari tetangga AJ, maka pak Agung menghubungi modin Ngegong yakni pak makin untuk dimintai keterangan. berdasarkan keterangan tambahan dari pak Makin, AJ ini memang merupakan

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² Agung Jatmiko, *Hasil Wawancara penghulu*, Kota Madiun, 9 Oktober 2024.

anak angkat, namun karena pak TK selaku orang tua AJ merupakan orang yang memiliki pengaruh dilingkungan rumahnya, akhirnya banyak orang yang lebih memilih diam akan fakta ini karena sungkan pada pak TK.

“Saudari AJ sebenarnya memang merupakan anak angkat, namun berhubung ‘ayah angkatnya’ merupakan orang baik dan memiliki pengaruh yang besar di lingkungannya, sehingga orang yang mengetahui fakta bahwa AJ merupakan anak angkat biasanya diam dan merahasiakan hal ini dari AJ sendiri maupun orang lain”¹¹³

Setelah mendapatkan keterangan dari pak modin Makin, kemudian pak Agung bersama pak Puji memutuskan untuk memanggil orang tua dari AJ untuk dilaksanakan proses Rafa’ dan dimintai keterangan lebih lanjut terkait kebenaran silsilah.

“Karena untuk lebih meyakinkan data tersebut, maka saya menanyakan kepada modin kelurahan Ngegong apakah AJ ini merupakan anak kandung atau anak angkat, dan menurut modin kelurahan ngegong anak tersebut merupakan anak angkat sejak bayi. Atas dasar keterangan dari tetangga saudari AJ dan pak modin Kelurahan Ngegong, Pak Agung dan kepala KUA memutuskan untuk memanggil orang tua dari saudari AJ.”¹¹⁴

Pada proses interogasi oleh pihak KUA ketika ditanyai, didesak dan diberikan nasihat terkait dampak dimasa mendatang oleh kepala KUA dan Pak Agung, kedua orang tua dari AJ menyebutkan dan bersikukuh bahwa AJ merupakan anak kandung mereka dan tetap akan dinikahkan dengan wali nasab. Akhirnya untuk menemukan jalan tengah pada permasalahan ini, pihak KUA memberikan solusi yang diterima oleh orang tua AJ.

“saat dilakukan proses Rafa’, ya mereka tetap mengaku bahwa itu merupakan anak kandung, meskipun pada waktu itu kami sudah memberikan nasihat dan pengertian terkait dampak di masa mendatang jika pernikahan tetap dengan akad wali nasab namun

¹¹³ Makin, *Hasil Wawancara modin*, Kota Madiun, 11 Oktober 2024

¹¹⁴ Agung Jatmiko, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 9 Oktober 2024.

ternyata wali nasab tersebut ternyata bukan, maka nikahnya tidak sah dan orang tua yang mengijabkan akan mendapatkan dosa zina selama ikatan pernikahan tetap ada”¹¹⁵

Karena merasa perdebatan tak ada ujungnya dan TK selaku orang tua AJ tetap kukuh mengatakan bahwa AJ merupakan anak kandung, Akhirnya KUA Manguharjo mengambil jalan tengah dengan cara memerintahkan kepada TK selaku ‘wali nasab’ dari AJ untuk membuat surat pernyataan bahwa AJ merupakan anak kandungnya dan juga menyertakan bahwa jika nantinya terdapat problem atau masalah baik di dunia maupun akhirat, yang menanggungnya adalah TK selaku orang tua AJ.

“Akhirnya setelah perdebatan panjang, kami minta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan yang berisi bahwa AJ merupakan anak kandung dari saudara TK dan dalam surat pernyataan tersebut dituliskan semua risiko akan ditanggung oleh TK jika terjadi suatu masalah dimasa mendatang yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat.”¹¹⁶

Saat mendengar solusi yang diberikan oleh pihak KUA, awalnya keluarga dari AJ tidak terima dikarenakan AJ merupakan anak mereka. Mereka beralih bahwa berkas kependudukan yang menyangkut dengan asal usul anak dan keterangan tentang orang tua sudah sesuai. Setelah diingatkan dan sedikit diancam oleh pihak KUA Manguharjo, akhirnya mereka setuju dan membuat surat pernyataan.

“Meskipun saat itu mereka tidak mau dikarenakan tetap kekeh bahwa AJ merupakan anak kandung berdasarkan berkas yang ada, namun akhirnya mereka setuju setelah kami agak paksa karena perdebatan panjang yang tak berujung”¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*,

Pada akhirnya setelah proses Rafa' dan semua pihak sepakat pernikahan saudari Aj dilangsungkan dengan 'wali nasab' pada tanggal 12 Juli 2023 di kediaman saudari AJ yang berlokasi di kelurahan Ngegong. Pernikahan pada kala itu dilangsungkan dengan wali nasab yang di walikan oleh TK yang merupakan ayah kandung secara data pendukung, dan terkait nasab juga otomatis dinasabkan pada TK yang dalam N2 dan N4 merujuk TK sebagai ayah kandung meskipun faktanya TK menurut keterangan tokoh agama setempat dan pak modin merupakan orang tua angkat dari AJ.

“Pernikahan tetap kami laksanakan dengan TK sebagai wali nasab dan dinasabkan pula pada TK pula atas pertimbangan berkas yang ada dan surat pernyataan dari TK, meskipun kami tahu bahwa faktanya AJ merupakan anak angkat dari TK”¹¹⁸

Pak Agung memberikan pernyataan tambahan terkait kejadian setelah beberapa bulan dilangsungkan akad dari pak Makin. Bahwa saudari AJ mendapatkan masalah dan diusir dari rumahnya dan dikatakan bukan anak kandung oleh orang tuanya.

“ Beberapa bulan setelah terjadinya pernikahan kami mendapatkan kabar dari pak modin bahwa terjadi masalah antara saudari AJ dan orang tuanya yang berkaitan dengan uang, sehingga mengakibatkan AJ dan suami diusir dari rumah. beberapa tetangga yang mendengar pertengkaran tersebut menyebutkan bahwa orang tua AJ sampai mengatakan bahwa AJ memang bukanlah anak kandungnya. Namun meskipun demikian, kami tidak mengulik lebih lanjut apakah itu benar atau tidak dikarenakan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh orang tua AJ”.¹¹⁹

Sebagai tambahan terkait kenapa pada kasus saudari YM dan saudari AJ memiliki penanganan yang berbeda. Pak Asrori menjelaskan bahwa

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ *Ibid.*,

penghulu dalam masalah serupa memiliki penafsiran dan penanganan yang berbeda beda. perbedaan para penghulu dalam menangani kasus serupa baik itu dari perbedaan wilayah kota maupun kecamatan yang satu kota, hal ini dikarenakan masih belum adanya hukum positif pasti yang membahas akan hal ini, sehingga para penghulu menafsirkan sendiri jika terdapat kasus yang tidak diatur secara jelas dalam KHI maupun hukum positif lainnya seperti halnya masalah anak angkat tadi.

“Ya sebenarnya tidak ada yang salah dalam keputusannya, karena kami juga menafsirkan dari hukum-hukum yang ada, baik itu yang khi maupun hukum Islam, sehingga tidak heran jika jalan keluar yang dipilih oleh satu KUA dan KUA lain berbeda. Bahkan terkait masalah anak angkat sendiri tidak ada hukum yang spesifik membahas tentang kasus yang demikian dalam suatu hukum sehingga mau tidak mau kami mengambil dari beberapa referensi hukum untuk dijadikan jalan keluar.”¹²⁰



¹²⁰ Asrori Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 17 Oktober 2024.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN ANAK ANGKAT
YANG DINASABKAN PADA AYAH ANGKAT DI KUA KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN**

Berdasarkan penggalian data, dapat diketahui bahwa di KUA kecamatan Manguharjo sejak tahun 2020 terdapat dua kasus pencatatan pernikahan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya. Dilihat dari waktu masuknya kasus terdapat kasus pernikahan antara saudara MM dan saudari YM yang terjadi pada bulan Oktober 2022, kemudian disusul oleh pernikahan dari saudara AN dan AJ pada Juli 2023.

Meskipun kedua temuan kasus pencatatan pernikahan sama-sama berhubungan dengan anak angkat, Namun dalam lapangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai perempuan ternyata anak angkat memiliki beberapa perbedaan, sehingga pihak KUA Kecamatan Manguharjo menggunakan jalan keluar yang berbeda pada tiap kasus dengan melihat beberapa aspek lain, sehingga kedua pernikahan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkat tetap dicatatkan dan dilaksanakan.¹²¹

Dari dua kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Manguharjo pernikahan tetap dilaksanakan tanpa mengembalikan pada nasab yang sebenarnya. Pada kasus pernikahan pertama yang telah terjadi antara saudara MM dengan saudari YM dilangsungkan dengan wali hakim namun nasabnya tetap menggunakan nasab dari

¹²¹ Lihat Bab III

ayah angkat. sedangkan pada pernikahan kedua antara saudara AN dengan saudari AJ dilakukan dengan wali nasab dan dinasabkan pula pada ayah angkatnya.¹²²

A. Analisis Yuridis dan Normatif Profesi Penghulu Terhadap Alasan Pencatatan Pernikahan Anak Angkat yang Dinasabkan Pada Ayah Angkat oleh KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

1. Tinjauan Yuridis Normatif

Dari data yang ditemukan dituliskan pada bab tiga diketahui bahwa alasan utama KUA Manguharjo tetap menikahkan dua dari kedua kasus yang ada dikarenakan beberapa sebab, antara lain pada kasus pertama dikarenakan orang tua asli susah untuk ditemukan, berkas pendukung sudah saling berkesesuaian, dan demi kemaslahatan bersama, baik dari segi waktu maupun kemaslahatan untuk mempelai perempuan maupun laki-laki. Pada kasus kedua, alasan KUA adalah surat pernyataan dari pihak orang tua mempelai perempuan yang mengakui bahwa AJ merupakan anak kandung, berkas pendukung saling berkesesuaian, serta demi kemaslahatan dari segi waktu maupun semua pihak.

Sehingga jika dikerucutkan maka alasan KUA tetap menikahkan anak angkat kemudian dinasabkan pada ayah angkat karena dokumen pendukung yang ada sudah saling berkesesuaian terutama pada bagian asal usul anak dengan keterangan tentang orang tua pada N4, Kesesuaian dokumen pendukung tersebut dikarenakan adalah anak angkat di adopsi tanpa melalui

¹²² Lihat Bab III

jalur pengadilan yang ada. Selain itu KUA juga berlandaskan pada kemaslahatan pada semua pihak yang terkait dalam pernikahan tersebut.¹²³

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologisnya, dan tidak diperkenankan mengambil nasab dari ayah angkatnya maupun seorang ayah mengaku bahwa anak angkatnya merupakan anak biologisnya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 5.¹²⁴ Dan dalam ayat tersebut dengan jelas menyuratkan bahwa diharamkan menasabkan seseorang yang bukan darah daging dari orang yang dirujuk sebagai ayahnya.

Sehingga jika ditinjau dari normatif hukum Islam, maka alasan KUA tetap mencatatkan nikah anak angkat ilegal dan dinasabkan pada orang tua angkatnya tanpa menolak berkas kehendak nikah untuk dibenahi terlebih dahulu nasab yang ada termasuk bertentangan dan pihak KUA ikut dalam memutuskan nasab yang sesungguhnya. Meskipun KUA beralasan bahwa dokumen pendukung anak tersebut menunjukkan bahwa itu merupakan anak kandung, tidak adanya pengakuan dari orang tua angkat bahwa mempelai perempuan adalah anak angkat, serta demi kemaslahatan semua pihak, namun KUA Manguharjo tidak mempertimbangkan bahwa ada saksi yang mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak angkat.

Dalam kedua kasus pernikahan yang ada, pihak KUA mendapatkan informasi dari pihak ketiga yang merupakan orang terpercaya. Pada kasus

¹²³ Lihat Bab III

¹²⁴ Vita Firdausiyah, *Status Anak Angkat.....*,22.

pertama pihak KUA mendapatkan informasi dari keluarga besar mempelai perempuan saat hari H akad bahwa YM merupakan anak angkat. Sedangkan pada kasus kedua pihak KUA memang agak curiga bahwa mempelai perempuan merupakan anak angkat, kemudian ditambah mendapatkan laporan dari tokoh agama setempat dari mempelai perempuan bahwa AJ merupakan anak angkat.

Jika ditinjau menggunakan hukum yuridis yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa adopsi dilakukan menurut kebiasaan dan norma masyarakat dengan niatan utama untuk memenuhi kepentingan serta kesejahteraan anak. sehingga dapat diketahui bahwa adopsi bagi umat Islam di Indonesia juga tidak mengubah status anak yang telah adopsi menjadi anak si pengadopsi. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 47 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Setelah ditetapkan oleh pengadilan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.¹²⁵ Yang menegaskan bahwa dia memang anak angkat.

Meskipun adopsi secara legal tidak mengubah status anak angkat, namun dalam beberapa kasus terdapat orang tua yang melakukannya secara ilegal dengan mengangkat anaknya sejak bayi dengan tanpa melalui jalur pengadilan negeri dan langsung mengakuinya dalam akta kelahiran. Sehingga ketika tidak terdapat bukti bahwa anak tersebut merupakan hasil dari adopsi,

¹²⁵ Musthofa Hasan, *Pengangkatan Anak Kewenangan.....*,56

maka anak tersebut seolah olah berstatus sebagai anak kandung, hal ini dikarenakan dalam pembuktian asal-usul anak yang tertulis dalam Pasal 55 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “silsilah seorang anak yang sah hanya dapat dipastikan dengan akta kelahiran yang asli, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil”.¹²⁶

Ketika anak angkat yang dilakukan secara ilegal ini akan mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan, berkas pendukung antara akta kelahiran dan kartu keluarga akan terlihat berkesesuaian seperti kedua kasus yang ada. Sehingga seakan akan anak tersebut merupakan anak kandung yang akan diwalikan serta dinasabkan kepada ayah kandungnya. Maka dari itu, pihak KUA Manguharjo membutuhkan laporan dari pihak lain yang mengetahui fakta bahwa anak tersebut merupakan anak angkat, seperti pengakuan dari Pak modin Parohadin yang baru diberitahu oleh keluarga jauh mempelai bahwa YM merupakan anak angkat pada hari H pernikahan MM dan YM. Namun saat diinterogasi oleh pihak KUA baik sebelum maupun sesudah akad terjadi, pihak orang tua dari YM tetap mengaku bahwa YM memang anak kandung mereka.¹²⁷

Tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya, kasus antara AN dan AJ juga diawali oleh laporan pihak ketiga yang mengetahui fakta bahwa saudari AJ merupakan anak angkat. Saat diadakan Rafa' dan ditanyai lebih lanjut, orang tua dari AJ menyangkal tuduhan bahwa AJ merupakan anak

37. ¹²⁶ Kementerian agama, *himpunan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kemenag, 2015)

¹²⁷ Lihat Bab III

angkat dan kekeh ingin menggunakan wali nasab meskipun Pihak KUA sudah mengingatkan dampak dimasa mendatang pada orang tua AJ. pada akhirnya pihak KUA memerintahkan orang tua AJ untuk membuat surat pernyataan pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu dimasa mendatang.¹²⁸

Dari dua kasus yang terjadi, ketika orang tua tidak mau mengakui fakta sebenarnya, KUA akan menganggap berkas kependudukan sebagai acuan dasar. Hal ini dikarenakan KUA atau penghulu sendiri tidak memiliki pegangan kuat terkait jalan keluar pada masalah anak angkat ini. Sehingga pihak KUA Manguharjo dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kasus yang ada seperti pada kasus antara MM dan YM maupun AN dan AJ mendasarkan pada akta kelahiran dan juga Kartu keluarga yang digunakan dalam mengisi surat N2 dan surat N4.

Hal di atas sejalan dengan peraturan yang menjadi landasan penghulu menolak kehendak nikah di antaranya adalah kurangnya dokumen atau terdapat halangan untuk nikah, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 J.O. Peraturan Mahkamah Agung No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah menyebutkan.¹²⁹ Dalam hal pemeriksaan dokumen kependudukan persyaratan nikah, maka kehendak nikah ditolak secara tertulis calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.”¹³⁰

¹²⁸ Lihat Bab III

¹²⁹ *Ibid.*,

¹³⁰ *Ibid.*,

Karena anak angkat tersebut berstatus sebagai anak kandung yang mana berkas pendukung seperti akta kelahiran, KK dan sebagainya merujuk orang tua angkat sebagai orang tua kandungnya sehingga tanpa kesadaran atau pengakuan dari pihak orangtua angkat meskipun terdapat saksi lain yang mengetahui peristiwa pengangkatan dilakukan secara ilegal, pihak penghulu tidak memiliki hak dan kewajiban dalam memaksakan pihak orangtua mempelai untuk mengakuinya. Sehingga alasan penghulu tetap mencatatkan pernikahan anak tanpa menolak kehendak nikah sudah sesuai dengan hukum yuridis yang ada.

Dengan demikian menurut peneliti, berdasarkan alasan penghulu KUA Manguharjo dalam menikahkan anak angkat ilegal yang disebabkan pada ayah angkatnya, jika dianalisis menggunakan yuridis, maka alasan penghulu tersebut tidak bertentangan dengan hukum yuridis, dikarenakan dokumen yang ada saling berkesesuaian dan tidak ada kejanggalan yang dapat mengakibatkan penghulu menolak kehendak nikah yang didaftarkan. Kemudian jika dilihat melalui normatif hukum Islam yang ada penghulu harusnya menolak kehendak nikah yang ada, hal ini disebabkan karena pihak KUA telah mengetahui dari pihak ketiga bahwa mempelai perempuan dari kedua kasus yang ada merupakan anak angkat, dan jika dilanjutkan pada pencatatannya akan memutuskan nasab yang ada.

2. Analisis Profesi Penghulu

Berdasarkan Berdasarkan penjelasan pak Asrori pada bab tiga disebutkan bahwa perbedaan yang ada pada tiap solusi terhadap kasus serupa

diakibatkan oleh tidak adanya hukum baku yang berkenaan dengan pernikahan anak angkat, sehingga penghulu mencari sendiri hukum yuridis yang ada, kemudian ditambahkan dengan hukum fikih yang berkesesuaian. dari alasan yang digunakan oleh penghulu KUA manghuharjo pada poin subbab sebelumnya, terdapat dasar hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sehingga mendasari penghulu tetap menikahkan pada kasus pertama dan kasus kedua,

Penghulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pelaksana pencatat perkawinan berlandaskan pada PMA No. 11 Tahun 2007 jo PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Yang mana di dalamnya diatur penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana tugas dan fungsi penghulu dalam bertindak dan berlaku terhadap proses pencatatan pernikahan, mulai dari berkas masuk hingga di adakannya akad. Serta tugas penghulu juga diatur dalam Surat Keputusan MUNASLUB APRI Nomor: 01/KPTS/MUNASLUB-APRI/I/ 2014 tentang Kode Etik Profesi Penghulu.¹³¹ Lebih jelas dalam pasal 3 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya penghulu diharuskan “Memberikan keputusan secara obyektif dan mengesampingkan kepentingan salah satu pihak dengan berpegang teguh pada Undang-undang, kaidah-kaidah Ushul Fiqh dan Fiqhiyyah.”

¹³¹ MUNASLUB APRI Nomor: 01/KPTS/MUNASLUB-APRI/I/ 2014 tentang Kode Etik Profesi Penghulu

Ketika proses penerimaan dan pemeriksaan berkas yang di dalamnya memuat Surat pengantar nikah, salinan Akta Kelahiran, salinan KK, salinan KTP bagi semua pihak, dan lain sebagainya. Kemudian pihak KUA atau penghulu akan mempelajari berkas yang ada, untuk memastikan semua berkas sesuai dan berkesinambungan dengan persyaratan berkas nikah. Ketika penghulu merasa terdapat kejanggalan atau terdapat berkas yang kurang, penghulu bisa mengembalikan berkas kehendak nikah untuk diperbaiki atau juga bisa ditolak untuk mengajukan permohonan di pengadilan.¹³²

Pada kasus pernikahan anak angkat yang disebabkan pada Ayah angkat di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, baik itu pada kasus pernikahan MM dengan YM ataupun AN dan AJ jika dilihat dari berkas yang masuk semuanya sudah sesuai dengan pasal 4 PMA No. 20 Tahun 2019 sudah berkesesuaian, apalagi yang berkaitan dengan berkas N2 dan N4,¹³³ sehingga pihak KUA awalnya tidak curiga bahwa itu merupakan anak angkat. Namun setelah mendapatkan laporan dari pihak ketiga bahwa itu merupakan anak angkat, penghulu akhirnya melakukan penyesuaian terhadap jalan keluar terbaik yang dapat diterima semua pihak. Yang mana pernikahan dari kedua pernikahan yang ada tetap dijalankan tanpa mengubah nasab yang sesungguhnya dan tetap merujuk ayah angkat sebagai ayah kandungnya.

¹³² Lihat Bab III

¹³³ Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 J.O. Peraturan Mahkamah Agung No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah

Jika di tinjau dari berdasarkan profesi penghulu penghulu sudah menjalankan pencatatan atas dasar yuridis dengan baik. Hal ini disebabkan karena pada pencatatan nikah tersebut semua berkas yuridis yang berkaitan dengan persyaratan nikah semuanya sudah sesuai dan saling berkesinambungan. Alasan KUA tetap menikahkan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya juga karena pengangkatan anak secara ilegal, yang mengakibatkan anak angkat tersebut didata seperti anak kandung. Sehingga jika dinilai dari hukum yuridis yang berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Penghulu sudah menjalankan tugas dan fungsinya.

Namun jika ditinjau melalui hukum normatif yang ada, pencatatan pernikahan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya ini tidak sesuai dengan tugas profesi yang didasarkan pada Surat Keputusan MUNASLUB APRI Nomor: 01/KPTS/MUNASLUB-APRI/I/ 2014 tentang Kode Etik Profesi Penghulu. Yang mana dalam pasal 3 ayat 1 huruf c penghulu berpegang teguh pada Undang-undang, kaidah ushul fiqh dan Fiqhiyyah. Yang mana dalam hukum Islam disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutuskan nasab dari orang tua kandungnya.¹³⁴

Dapat dikatakan bahwa ketika anak tersebut diangkat dan diasuh oleh orang lain, nasab yang tertulis dalam buku nikah tetap dituliskan sebagai anak dari ayah kandungnya. Sehingga pada dua kasus pencantuman nasab pada

¹³⁴ MUNASLUB APRI Nomor: 01/KPTS/MUNASLUB-APRI/I/ 2014 tentang Kode Etik Profesi Penghulu

ayah angkat di buku nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun secara tidak langsung memutuskan nasab dari orang tua kandung dari para mempelai perempuan yang sudah dinikahkan.

Dengan demikian Menurut peneliti, dari kasus di atas dapat dikatakan bahwa alasan penghulu KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam tetap menikahkan perkawinan anak angkat yang disebabkan pada ayah angkatnya tidak melanggar terhadap tugas profesi penghulu dikarenakan dalam prosesnya penghulu menggunakan dasar kesesuaian antar berkas yang ada, terutama N2 dan N4, serta juga demi kemaslahatan para pihak terkait. Di sisi lain pihak orang tua dari kedua belah pihak bertanggung jawab sepenuhnya pada pemutusan nasab yang terjadi, hal ini dikarenakan mereka kekeh pada pendapat mereka bahwa anak tersebut merupakan anak kandung.

B. Analisis Hukum Yuridis Normatif Dengan Praktik Wali Nikah Dalam Pencatatan Perkawinan Anak Angkat yang Disebabkan pada Ayah Angkat di KUA Manguharjo Kota Madiun

Dari data yang ditemukan dituliskan pada bab tiga diketahui bahwa meskipun keduanya sama-sama merupakan pernikahan anak adopsi yang diangkat secara ilegal, namun praktik perwalian dalam akad nikah yang ada berbeda, pada kasus pertama menggunakan wali menggunakan wali hakim dikarenakan pihak orangtua setuju karena demi berlangsungnya pernikahan pada hari itu. namun dalam kasus kedua menggunakan wali nasab, hal ini dikarenakan pihak orang tua angkat tetap tidak mau mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak angkat, disisi lain penghulu tidak berani

menikahkan karena adanya keyakinan bahwa anak tersebut anak angkat ilegal. hingga akhirnya pihak orang tua sanggup membuat surat pernyataan bahwa Anak tersebut merupakan anaknya.¹³⁵

Adanya wali nikah dalam suatu akad nikah adalah suatu keharusan dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan dengan adanya wali. Apabila pernikahan diwalikan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali, maka pernikahan tidak sah dikarenakan akad tidak sempurna dan pernikahan tersebut berpotensi zina. Wali merupakan seorang yang memiliki kuasa atas mempelai perempuan sebelum dinikahkan, serta wali pula juga sebagai perantara atau bahkan seorang yang langsung dapat menolak atau menerima lamaran perkawinan.¹³⁶

Sama halnya dengan anak kandung pada umumnya, anak angkat memiliki hubungan perwalian nikah dengan ayah kandungnya. Hal ini dikarenakan pada proses pengangkatan anak tidak memutuskan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga jika anak angkat tersebut perempuan, maka perwalian nikahnya tetap diwalikan ke wali nasab.¹³⁷

Jika dilihat menggunakan pasal 13 ayat 3 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, yang menyebutkan bahwa “wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab yang berhak tidak diketahui keberadaannya, maka pihak KUA telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum yuridis”. Secara hukum normatif

¹³⁵ Lihat Bab III

¹³⁶ Rizky Nanda, “Studi Komparatif Antara Hukum,70

¹³⁷ Vita Firdausiyah, *Status Anak Angkat.....*,22.

juga sama dengan hukum yuridis, dikarenakan masalah wali nikah pada hukum yuridis merupakan implementasi langsung dari hukum Islam.

Sedangkan dalam kasus pencatatan nikah AN dengan AJ, pihak KUA menggunakan wali nasab yang tertulis pada berkas yang ada, sehingga dapat dikatakan pernikahan ini diwalikan oleh wali ayah angkat, hal ini berdasarkan keterangan dari tokoh agama setempat yang mengetahui bahwa AJ merupakan anak angkat dan bukan anak kandung.

Namun saat dimintai keterangan dalam proses Raha', kedua orang tua dari AJ menyangkal fakta yang diutarakan oleh tokoh agama setempat, sehingga mereka tetap mengaku bahwa AJ merupakan anak kandung dan tetap meminta untuk diwalikan secara nasab pada TK. Atas dasar itu akhirnya ditemui kesepakatan bahwa TK membuat surat pernyataan menanggung semua tanggung jawab jika terjadi sesuatu terkait perwalian ini.

Atas dasar surat pernyataan dan kesesuaian antar berkas N2 dan N4 yang ada, maka dalam praktik perwalian nikah, pihak KUA mengizinkan TK sebagai 'wali nasab' yang melakukan ijab. Sehingga jika ditinjau melalui hukum yuridis yang ada, hal ini bertentangan jika TK bukanlah wali nasab yang sesungguhnya, hal ini dikarenakan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab yang berhak maka bisa digantikan dengan wali hakim.¹³⁸ Namun dalam pernikahan ini tidak demikian, TK tetap mengaku bahwa AJ merupakan anak kandungnya, sehingga dia beranggapan tetap berhak menjadi wali nasab.

¹³⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum.....*,99

Dalam hukum islam, pernikahan tanpa wali yang berhak mewalikan dalam nikah maka nikahnya dapat batal, jika pernikahan tetap dilaksanakan maka hubungan yang terjadi setelahnya dapat mejadi zina, hal ini didasarkan pada hadith:

"Wanita mana saja yang menikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah).¹³⁹

Sehingga jika pada kasus kedua merupakan anak angkat, maka pernikahan tersebut batal dan tidak sah, dikarenakan diwali nikahkan oleh wali yang bukan semestinya.

Kemudian jika dilihat menggunakan pasal 13 ayat 3 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, yang menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Maka hal ini tidak berkesesuaian dengan praktik yang ada jika dilihat secara normatif, namun ketika dilihat berdasarkan yuridis yang didasarkan pada berkas N2 dan N4 maka hal ini sudah sesuai karena ayah yang terdapat pada N4 menunjukkan bahwa TK merupakan ayah kandung.

Dengan demikian menurut peneliti, disini perwalian yang dilakukan pada kasus pernikahan pertama sudah sesuai dengan hukum yuridis dan normatif hukum Islam, dikarenakan perwaliannya menggunakan

¹³⁹ *Ibid.*, 50.

menggunakan wali hakim. hal ini sudah sesuai dikarenakan ketika wali nasab yang utama tidak ada, maka wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah. Pada kasus kedua, perwalian yang ada sudah sesuai dengan hukum yuridis, namun bertentangan dengan normatif hukum Islam, hal ini disebabkan karena wali nikah pada kasus kedua menggunakan wali nasab yang didasarkan pada berkas yang ada, padahal wali tersebut nyatanya merupakan ayah angkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan alasan penghulu KUA Manguharjo dalam menikahkan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya, jika dianalisis menggunakan yuridis, maka alasan penghulu tersebut tidak bertentangan dengan hukum yuridis, dikarenakan dokumen yang ada saling berkesesuaian dan tidak ada kejanggalan yang dapat mengakibatkan penghulu menolak kehendak nikah yang didaftarkan. Kemudian jika dilihat melalui normatif yang ada penghulu harusnya menolak kehendak nikah yang ada, hal ini disebabkan karena pihak KUA telah mengetahui dari pihak ketiga bahwa mempelai perempuan dari kedua kasus yang ada merupakan anak angkat, dan jika dilanjutkan pada pencatatannya akan memutuskan nasab yang ada. Sehingga alasan penghulu KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam tetap menikahkan perkawinan anak angkat ilegal tidak melanggar tugas profesi penghulu dikarenakan dalam prosesnya penghulu menggunakan dasar kesesuaian antar berkas yang ada, terutama N2 dan N4. Di sisi lain pihak orang tua dari kedua belah pihak bertanggung jawab sepenuhnya pada pemutusan nasab yang terjadi, hal ini dikarenakan mereka kekeh pada pendapat mereka bahwa anak tersebut merupakan anak kandung.
2. Perwalian yang dilakukan pada kasus pernikahan pertama sudah sesuai dengan hukum yuridis dan normatif, dikarenakan perwaliannya menggunakan wali hakim. hal ini sudah sesuai dikarenakan ayah kandung yang merupakan wali nasab utama tidak diketahui keberadaannya, maka wali hakim yang bertindak

sebagai wali nikah. Pada kasus kedua, perwalian yang ada sudah sesuai dengan hukum yuridis karena TK merupakan ayah kandung secara berkas otentik, namun bertentangan dengan normatif yang didasarkan pada hukum Islam, hal ini disebabkan karena wali nikah pada kasus kedua menggunakan wali nasab yang didasarkan pada berkas yang ada, padahal wali tersebut nyatanya merupakan ayah angkat, sehingga pernikahan tersebut tidak sah karena dinikahkan oleh orang asing.

B. Saran

1. Bagi KUA Manguharjo lebih ditegaskan lagi terkait perbedaan fakta lapangan dengan berkas yang ada, sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan antara hukum yuridis dan normatif yang ada. Disisi lain KUA perlu meneliti kembali nasab yang ada sebelum adanya pernikahan yang dilakukan Dengan lebih teliti, sehingga dapat dicegah saat kehendak pernikahan diajukan ke KUA.
2. Bagi masyarakat Kota Madiun diharapkan untuk melek hukum, terutama untuk pengangkatan anak secara legal, sehingga nasab seorang anak tidak terputus dengan alasan apa pun.
3. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan hukum yang ada terutama pada masalah anak angkat yang diadopsi tidak melalau jalur hukum, sehingga diharapkan mampu membuat hukum baku yang dapat digunakan seluruh penghulu dalam menyelesaikan perkara anak angkat ilegal yang mengajukan kehendak nikah di KUA setempat.
4. Bagi peneliti selanjutnya bisa lebih diteliti lagi terkait hukuman dan akibat hukum bagi penghulu yang tidak menjalankan tugas serta fungsinya secara tidak

maksimal dan tidak berdasarkan hukum yuridis maupun fikih yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Alam, Andi. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada. 2008.
- Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Djaliel, Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak Angkat dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2018.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. 2022.
- Kementerian agama, *himpunan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kemenag. 2015.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Mustofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Rahim, Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat agama dan masa kesultanan dan kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos. 1998.
- Rini, Yufi Wiyos. *BP4 Kepenghuluan*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. t.tp. t.th.
- Rosadi, Aden. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2021.
- Setiawan, Anggito. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV jejak. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Tim Penyusun Kamus. Pusat Pembinaan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2004

Referensi Jurnal

Ahmad, La Ode Ismail. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1 (2015). 50.

Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *dinamika hukum* Vol.9, No.2 (2009).

Firdausiyah, Vita. "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol.1, No1. (2023).

Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*.1.,1. (2014).

Ikmal, Hafif, "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah)" *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol. 3, No. 1 (2022).

Jamil, "Nasab daalam perspektif tafsir ahkam". *jurnal Al-Ahkam*. Vol.1, No.1 (2016)

Mirwan, Fajar, "Efektifitas Pernikahan dalam Islam dengan Implementasi Wali: Studi Lapangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten Medan Kota," *Jurnal Tana Mana* Vol.2, No.2 (2021).

Nanda, Rizky. "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat" *jurnal al-Mizan* Vol.2, No.1 (2018)

Sugeng, Tedjo Asmo. dan Dicky Edwin Kusuma. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami," *Ilmiah Fenomena* Vol.1, No.1. (2016).

Sakirman, "Telaah Hukum Islam terhadap Nasab Anak". *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 2, No. 3 (2015)

Tristiana, Enis. "Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* Vol.7, No.1 (2023).

Referensi Skripsi

Hidayah, Desi Robiul. Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.

Mariah, Imro'atul Toyibatul. Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Rohmah, Annisa Alvi Nur. Penisbatan Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara), *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Referensi peraturan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 j.o. Peraturan Mahkamah Agung No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah

Surat Keputusan MUNASLUB APRI Nomor: 01/KPTS/MUNASLUB-APRI/I/2014 tentang Kode Etik Profesi Penghulu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

